



DANA PENSIUN

ECONOMIC OUTLOOK 2023



**'CUT LOSS' INVESTASI:
ANTARA BENCI DAN RINDU**

**'PRUDENT'
MENATA INVESTASI
DI TENGAH GEJOLAK**

**JENJANG KARIR
INSAN DANA PENSIUN**

REDAKSI

Penasihat:
Mudjiharno

Pemimpin Umum:
Ali Farmadi

Pemimpin Redaksi:
Arif Hartanto

Redaktur Pelaksana:
Aloy Tagawai

Sekretaris Redaksi:
Bambang Sri Mulyadi

Dewan Redaksi:
Budi Ruseno, Budi Sutrisno, Purwaningsih,
Erry Dwi Prasetyo, Fajar Gustaf,
dan Soegihartono

Kuangan:
Heru AZ

Pemasangan Iklan:
Marissa

Fotografer:
Subandi

Sirkulasi/Distribusi:
Subandi

ALAMAT REDAKSI:

Wisma 46 - Kota BNI, Lantai 3 - Suite 3.05
Jl Jend. Sudirman Kav. 1
Jakarta 10220

Tlp: (021) 2514761, 2514762 Fax: (021) 2514760,
E-mail: adpipusat@adpi.or.id

PENERBIT:

PT JAGATMEDIA & BISNIS

OPTIMIS PULIH 2023

IMF melihat Indonesia sebagai salah satu negara yang dikecualikan dampak krisis, dan mengibaratkan Indonesia sebagai terang di kegelapan dunia. Setelah mencapai perumbuhan 5,7% pada kuartal III-2022, pemerintah optimis target pertumbuhan 5,3% pada 2023 akan tercapai. IMF melihat peluang Indonesia mencapai pertumbuhan 5% sangat terbuka.

Sentimen positif ekonomi makro pada 2023 akan menjadi dukungan utama pulihnya pasar saham. Para analis pasar saham pun optimistis indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia bisa menggapai level 7.880 dengan skenario moderat di kisaran 7.500. Optimisme ini didukung fakta bahwa investor global sangat memperhitungkan Indonesia sebagai salah satu tujuan investasi.

JP Morgan bahkan melihat saham perbankan Indonesia akan menjadi



motor kebangkitan pasar saham. Di luar itu sinyal positif juga datang dari sektor pertambangan, industri dasar, maupun consumer goods. Kinerja positif emiten tahun 2022 diyakini akan menjadi daya dukung kebangkitan pasar saham 2023. Momentum yang baik untuk membuat keputusan investasi.

Wasallam
Redaksi

DAFTAR ISI >>**UTAMA****8**

TETAP OPTIMISTIS DI TENGAH KETIDAKPASTIAN GLOBAL

13

'PRUDENT' MENATA INVESTASI DI TENGAH GEJOLAK

14

PELUANG 'CUAN' SAAT IHSG MENUJU LEVEL 7.800

18

EPISODE PEMULIHAN PASAR OBLIGASI

3

[KOLOM] Oleh: Ibrahim

Menjaga Kesehatan Keuangan dengan 'Financial Check-Up'

4

[KOLOM] Oleh: R Herna Gunawan

Analisa Risiko [Risk Analysis]

20

[KOLOM] Oleh: Siti Rakhmawati

'Cut Loss' Investasi: Antara Benci dan Rindu

22

[KOLOM]

Oleh: Cahyo Indraswono, SE., M.Sc., Ak., CA.

"Dana Pensiun Goes to Campus"

24

[KOLOM] Oleh: Salihuddin, CFP, IFP.

Peran Dana Pensiun dalam Pembiayaan Hijau

26

[KOLOM] Oleh: Nugroho Dwi Priyohadi

Urgensi Sosialisasi MUDP untuk Masyarakat dan Aparatur Pemerintahan

28

[EKSPOSE]

SEPUTAR KEGIATAN ADPI

JENJANG KARIR INSAN DANA PENSIUN

REUNI PEJABAT DPP ADPI DARI MASA KE MASA

DIREKTUR EKSEKUTIF PERKUMPULAN ADPI





Oleh: **Ibrahim** (Dapen Astra)

MENJAGA KESEHATAN KEUANGAN DENGAN 'FINANCIAL CHECK-UP'

Sama halnya seperti menjaga kesehatan tubuh dengan cara rutin melakukan Medical Check-Up. Financial Check-Up perlu dilakukan untuk memeriksa kondisi keuangan secara menyeluruh, untuk memastikan apakah kondisi keuangan sudah sehat atau perlu perbaikan. Financial Check-Up dilakukan sebagai tahap awal dalam manajemen keuangan pribadi. Menurut Cummins (2009), kemampuan seseorang untuk mengelola keuangan menjadi salah satu faktor penting untuk mencapai sukses dalam hidup, sehingga pengetahuan akan pengelolaan keuangan yang baik dan benar menjadi penting bagi anggota masyarakat khususnya individu.

BAGAIMANA CARA MELAKUKAN FINANCIAL CHECK-UP?

Langkah dalam melakukan Financial Check-Up adalah mencatat pendapatan, pengeluaran, serta melakukan identifikasi aset dan kewajiban/utang yang kita miliki. Selanjutnya individu perlu menghitung rasio-rasio keuangan, antara lain:

a. Rasio Likuiditas (*Basic Liquidity Ratio*)

Rasio likuiditas merupakan rasio yang membandingkan aset yang dapat dikonversi dengan cepat dengan kebutuhan pengeluarannya. Rasio ini dapat mengukur berapa lama rumah tangga mampu membiayai kebutuhannya tanpa mengandalkan pendapatannya. Berikut ini adalah rumus perhitungan rasio likuiditas:

$$\text{Rasio Likuiditas} = \frac{\text{Kas atau setara kas}}{\text{Pengeluaran bulanan}}$$

Menurut Financial Planning Standards Board (FPSB) Indonesia, seseorang dianggap aman apabila mempunyai rasio likuiditas antara 3-6 bulan sebagai cadangan kas untuk menyokong biaya hidupnya apabila terjadi hal-hal yang diluar kendali.

b. Rasio Tabungan (*Saving Ratio*)

Rasio Tabungan adalah rasio yang menggambarkan berapa persen dari pendapatan kotor yang disisihkan untuk penggunaan / konsumsi di masa depan da-

lam bentuk simpanan/investasi. Berikut ini adalah rumus perhitungan rasio tabungan:

$$\text{Rasio Tabungan} = \frac{\text{Pendapatan Kotor yang Disisihkan untuk Saving/ Investasi}}{\text{Pendapatan Kotor}}$$

Seseorang diharapkan memiliki rasio tabungan paling tidak sebesar 10% atau lebih untuk keperluan mendatang.

c. Rasio Pendapatan (*Income Ratio*)

Rasio Pendapatan adalah rasio yang membandingkan penghasilan terhadap pengeluaran rutin, seperti sewa rumah, biaya listrik, biaya transport, biaya makan, dll. Berikut ini adalah rumus perhitungan rasio pendapatan:

$$\text{Rasio Pendapatan} = \frac{\text{Pendapatan}}{\text{Pengeluaran Rutin}}$$

Seseorang diharapkan memiliki rasio pendapatan paling tidak sebesar 2x atau lebih. Jangan sampai rasio pendapatan kurang dari 1x, yang artinya lebih besar pengeluaran dibandingkan pendapatan.

d. Rasio Utang terhadap Aset (*Debt to Asset Ratio*)

Rasio utang terhadap aset adalah rasio untuk mengukur utang seseorang terhadap jumlah keseluruhan aset yang dimilikinya. Berikut ini adalah rumus perhitungan rasio utang terhadap aset:

$$\text{Rasio Utang terhadap Aset} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

Seseorang direkomendasikan memiliki tingkat Rasio Utang terhadap Aset tidak lebih dari 50%.

e. Rasio Kemampuan Pelunasan Utang (*Debt Service Ratio*)

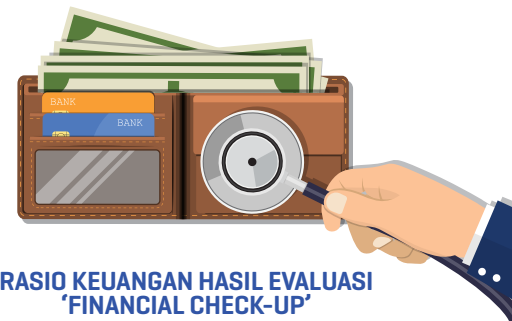
Rasio Kemampuan Pelunasan Utang (*Debt Service Ratio*) adalah rasio yang membandingkan total pembayaran pinjaman terhadap pendapatan seseorang. Berikut ini adalah rumus perhitungan rasio kemampuan pelunasan utang:

$$\text{Rasio Kemampuan Pelunasan Utang} = \frac{\text{Total Pembayaran Angsuran}}{\text{Total Pendapatan}}$$

Seseorang direkomendasikan memiliki tingkat Rasio Utang terhadap Aset tidak lebih dari 35%.

Setelah membandingkan rasio keuangan, selanjutnya seseorang dapat membandingkannya dengan rasio ideal yang dapat dijadikan acuan. Apabila terdapat rasio keuangan yang belum ideal, seseorang perlu melakukan evaluasi keuangan. Namun perlu diingat, bahwa kondisi keuangan dan profil risiko dari setiap individu berbeda-beda, sehingga rasio ideal bagi setiap individu dapat berbeda.

Selanjutnya, apabila individu sudah berhasil menjaga kondisi keuangan di level aman, pada prakteknya selalu ada kemungkinan tak terduga yang dapat menyebabkan masalah keuangan. Untuk itu, kita disarankan untuk memiliki proteksi melalui asuransi. Sehingga, apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kondisi keuangan seseorang dapat tetap terjaga. Dengan melakukan Financial Check-Up secara rutin, harapannya seseorang dapat mengetahui kondisi keuangannya secara menyeluruh. Apabila terjadi masalah keuangan, seseorang yang sudah melakukan Financial Check-Up akan lebih siap untuk mengantisipasinya.



RASIO KEUANGAN HASIL EVALUASI 'FINANCIAL CHECK-UP'

RASIO KEUANGAN	RASIO IDEAL*
Rasio Likuiditas [Basic Liquidity Ratio]	3-6x bulan
Rasio Tabungan [Saving Ratio]	≥ 10%
Rasio Pendapatan [Income Ratio]	≥ 2x
Rasio Perbandingan Utang thd Aset [Debt to Asset Ratio]	≤ 50%
Rasio Kemampuan Pelunasan Utang [Debt Service Ratio]	≤ 35%

* Rasio ideal menggunakan acuan best practice menurut Financial Planning Standards Board Indonesia



Oleh : **R Herna Gunawan**
[Dana Pensiun Telkom]

ANALISA RISIKO [RISK ANALYSIS]

Manajemen risiko hadir untuk menjaga perusahaan atau bisnis mencakup karyawan dan reputasi perusahaan dari kendala dan juga masalah yang kemungkinan akan terjadi. Risiko itu tidak dapat dihindari dan seiring berjalannya waktu mungkin saja akan terjadi. Maka dari itu diperlukan tindakan-tindakan untuk menghadapi risiko tersebut. Dapat kita ketahui bahwa tidak semua risiko dapat dihilangkan atau dihindari, oleh karena itu diperlukan tindakan-tindakan pencegahan atau tindakan untuk menghadapi risiko yang telah teridentifikasi. Dalam membangun bisnis apapun kita harus bisa melakukan analisis mengenai kemungkinan terjadinya kerugian, hal tersebut akan membantu kita untuk melakukan langkah-langkah pencegahan lebih dini.

Penerapan manajemen risiko sangat penting untuk dilakukan. Dengan melakukan manajemen risiko akan membuat kekurangan-kekurangan kegiatan operasional organisasi terdeteksi lebih awal. Terdapat banyak risiko yang perlu dipertimbangkan. Untuk setiap risiko banyak kemungkinan skenario yang mungkin terjadi tergantung pada waktu, besarnya, dan lokasi. Dengan demikian suatu organisasi harus melakukan suatu proses penilaian terhadap risiko yang sudah teridentifikasi.

PENILAIAN RISIKO

Penilaian Risiko (Risk Assessment) merupakan suatu aktivitas yang



TAHAPAN PROSES PENILAIAN RISIKO (risk assessment step)



dilaksanakan untuk memperkirakan suatu risiko dari situasi yang bisa didefinisikan dengan jelas ataupun potensi dari suatu ancaman atau bahaya baik secara kuantitatif atau kualitatif. Penilaian risiko juga bisa diartikan sebagai suatu proses pemeriksaan keamanan dengan suatu struktur tertentu, pembuatan suatu rekomendasi khusus, dan rekomendasi pengambilan keputusan dalam suatu proyek dengan menggunakan analisis risiko, perkiraan risiko, dan informasi lain yang memiliki

potensi untuk mempengaruhi keputusan.

Ada dua jenis utama metodologi dalam melakukan penilaian risiko/risk assessment yaitu Penilaian Risiko secara Angka atau Finansial/ Quantitative Risk Assessment dan Penilaian Risiko Fisik tanpa memperhitungkan nilai kerugian finansial/ Qualitative Risk Assessment.

PENILAIAN RISIKO KUANTITATIF/ QUANTITATIVE RISK ASSESSMENT

Quantitative risk assessment berfokus pada angka dimana secara finansial

(Tabel 2)
PROSES ANALISIS RISIKO

No	Sasaran (KPI)	Jenis Risiko	Risiko (KRI)		Sumber Risiko	Pengendalian	Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko
			Nama	Penyebab					
RO-02	Pembayaran Manfaat Pensiun Tepat, Tepat Jumlah dan Tepat Penerima	Risiko Operasional	Kelebihan Pembayaran Manfaat Pensiun	Data Penerima Manfaat Pensiun Tidak Valid	Internal : Penginian Data	Verifikasi data setiap 2 thn sekali	4	3	12

(Tabel 3)
KRITERIA KEMUNGKINAN TERJADI RISIKO

Probabilitas		Kriteria
Rating	%	
1 Rendah (Low)	0 - 10	Sangat tidak mungkin/hampir mustahil terjadi
2 Sedang Rendah (Low to Medium)	10 - 30	Kecil kemungkinan, tapi tidak mustahil terjadi
3 Sedang (Medium)	30 - 50	Kemungkinan terjadi
4 Sedang Tinggi (Medium to High)	50 - 90	Kemungkinan sering terjadi
5 Tinggi (High)	> 90	Hampir pasti terjadi

(Tabel 4)
DAMPAK DARI RISIKO

Rating Dampak	Rating	Keterangan
Tinggi (High)	5	Mengancam program dan organisasi serta stakeholder. Kerugian sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun politis.
Sedang Tinggi (Medium to High)	4	Mengancam fungsi program yang efektif dan organisasi. Kerugian cukup besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun politis.
Sedang (Medium)	3	Mengganggu administrasi program. Kerugian keuangan dan politis cukup besar.
Sedang Rendah (Low to Medium)	2	Mengancam efisiensi dan efektivitas beberapa aspek program. Kerugian kurang material dan sedikit mempengaruhi stakeholder.
Rendah/Tidak Signifikan (Low)	1	Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin. Kerugian tidak material dan tidak mempengaruhi stakeholder.

terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kerugian yang terjadi dengan menggunakan data yang dapat diukur untuk menilai risiko dan mengkuantifikasinya.

Berdasarkan risiko yang sudah diidentifikasi mulai dengan menyusun kemungkinan risiko dan tingkat keparahan serta kerugian yang mungkin terjadi. Kemudian buat suatu analisa Aset mana yang akan terpengaruh oleh risiko? Berapa banyak yang akan hilang? dst..

**PENLAIAN RISIKO KUALITATIF/
QUALITATIVE RISK ASSESSMENT**

Qualitative risk assessment bukanlah tentang kerugian nilai angka tetapi lebih fokus suatu nilai proses, kualitas dan lebih banyak tentang apa yang sebenarnya akan terjadi. Metodologi qualitative risk assessment dilakukan dengan berbicara atau wawancara dengan unit kerja yang berbeda sebagai pemilik proses dan bisa mengajukan pertanyaan tentang bagaimana operasi mereka akan

dipengaruhi oleh risiko, bagaimana kualitas suatu produk apabila ada aduan dari pelanggan, bagaimana evaluasi web jika terjadi serangan atau pelanggaran etika, dst. Wawancara ini akan menunjukkan kepada kita bahwa sejauh mana system, kualitas dan tingkat keamanan sangat penting untuk operasional suatu organisasi, dan juga bisa menentukan aktivitas mana yang tidak terlalu penting.

Qualitative risk assessment tidak seakurat quantitative risk assessment, tetapi dapat memberikan informasi penting yang lebih penting harus kita tangani bukan hanya sekadar konsekuensi yang sudah terdapat dalam daftar identifikasi risiko. Jika kita mengetahui sebelumnya bagaimana risiko dapat memengaruhi produktivitas setiap aktivitas, maka kita dapat memiliki rencana untuk mengurangi risiko tersebut.

Dalam proses penilaian risiko terdapat beberapa tahapan yaitu:

1. Identifikasi Risiko [Risk Identification]

Identifikasi risiko merupakan suatu proses untuk mengenali, menemukan, atau mengidentifikasi risiko. Risiko dapat diidentifikasi melalui sumber dari risiko dan dampak kerugian yang ditimbulkannya. Berdasarkan dampak tersebut dapat dinilai risiko apa saja yang berpotensi besar dalam menimbulkan kerugian. Pembahasan secara detil terkait dengan identifikasi risiko ini telah diuraikan dalam Info Dana Pensiun edisi 102 tahun 2022.

2. Analisa Risiko [Risk Analysis]

Merupakan proses untuk memahami sifat risiko dan untuk menentukan tingkat risiko. Analisis risiko melibatkan pertimbangan dari penyebab dan sumber risiko, konsekuensi positif dan negatif, dan tingkat keparahan (severity) jika terjadi, dan seberapa sering kemung-

kinan (probability) risiko tersebut terjadi dalam satuan waktu.

3. Evaluasi Risiko [Risk Evaluation]

Tujuan dari evaluasi risiko adalah untuk membantu dalam membuat keputusan, berdasarkan hasil analisis risiko, risiko mana yang memerlukan perbaikan dan prioritas untuk dilakukan lebih awal. Terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan yaitu :

- a. Keputusan harus mempertimbangkan konteks yang lebih luas dari risiko dan mencakup pertimbangan toleransi risiko ditanggung oleh pihak lain selain organisasi yang memiliki risiko.
- b. Keputusan harus dibuat sesuai dengan hukum, peraturan dan lainnya.
- c. Keputusan harus dibuat dalam persyaratan sesuai
- d. Dalam beberapa situasi, evaluasi risiko dapat menyebabkan keputusan untuk melakukan analisis lebih lanjut
- e. Evaluasi risiko juga dapat menyebabkan keputusan untuk tidak memperlakukan risiko dengan cara apapun selain mempertahankan kontrol yang ada.

ANALISA RISIKO [RISK ANALYSIS]

Analisa Risiko merupakan suatu proses untuk memahami sifat risiko dan menentukan tingkat risiko. Kegiatan utama dilakukan pada tahap ini adalah memberi nilai pada risiko agar dapat ditimbang tingkatnya. Kuantifikasi risiko ini dilakukan dengan menyatakan dua dimensi risiko, yaitu kemungkinan dan dampak, dalam bentuk angka yang dapat diperbandingkan.

Untuk memudahkan, nilai kemungkinan dan dampak pada umumnya dinyatakan dalam skala tertentu, seperti skala likert, pada umumnya skala 1 s.d. 5 cukup memadai. Nilai kemungkinan 1 berarti sangat jarang dan 5 berarti sangat sering, sedangkan nilai dampak 1 berarti sangat ringan dan 5 berarti sangat berat.



(Tabel 5)
PENERIMAAN RISIKO

Level Risiko	Kriteria untuk Manajemen Risiko	
1 Rendah (Low)	Dapat diterima	Dengan pengendalian yang cukup
2 - 3 Sedang Rendah (Low to Medium)	Dipantau	Dengan pengendalian yang cukup
4 - 8 Sedang (Medium)	Diperlukan Pengendalian Manajemen	Dengan pengendalian yang cukup
9 - 12 Sedang Tinggi (Medium to High)	Penting	Dapat diterima hanya dengan pengendalian yang sangat baik (<i>excellent</i>)
13 - 25 Tinggi (High)	Sangat Penting/ Bahaya	Dapat diterima hanya dengan pengendalian yang sangat baik (<i>excellent</i>) dan penanganan yang khusus

Setelah nilai kemungkinan dan dampak diperoleh, nilai risiko dapat dihitung dari perkalian antara kedua nilai ini.

Nilai risiko biasanya diberikan dengan mempertimbangkan pengendalian atau kontrol yang telah diterapkan. Pengendalian adalah cara untuk memodifikasi risiko, yang dapat berupa kebijakan, proses, atau alat. Meskipun sudah ada, pengendalian bisa saja tidak efektif. Pengendalian yang ada pun perlu diidentifikasi sebagai bahan pertimbangan pada tahap proses manajemen risiko selanjutnya.

Proses analisis risiko dapat dilakukan dengan menambahkan 4 kolom pada register risiko (pembahasan identifikasi risiko edisi sebelumnya), yaitu pengendalian, nilai kemungkinan, nilai dampak, dan nilai risiko. Pada **Tabel 2** dapat dilihat contoh yang dihasilkan setelah tahap analisis risiko. Kolom yang berwarna biru dihasilkan dari proses identifikasi risiko, sedangkan kolom yang berwarna hijau dihasilkan dari proses analisis risiko.

KRITERIA RISIKO

Kriteria risiko merupakan ukuran yang ditetapkan organisasi termasuk perusahaan untuk digunakan dalam menilai tingkat eksposur risiko. Kriteria risiko terdiri dari kriteria kemungkinan risiko dan kriteria dampak risiko. Kriteria kemungkinan risiko adalah kriteria untuk mengukur **tingkat kemungkinan terjadinya suatu risiko**, sedangkan kriteria dampak risiko berfungsi mengukur **tingkat dampak akibat terjadinya suatu risiko**. Area dampak risiko merupakan wilayah/ aspek/item yang ditetapkan organisasi sebagai yang terdampak dan perlu diukur tingkat keterpaparannya (tingkat eksposur risiko). Kriteria dampak risiko dapat diklasifikasikan berdasarkan level dampak atau konsekuensi yang diperlukan oleh setiap organisasi. Kriteria risiko tersebut akan menjadi acuan bagi risk owner atau unit pemilik risiko dalam menentukan tingkat kemungkinan dan dampak apabila risiko terjadi. Penetapan kriteria sangat penting

untuk menganalisis dan mengevaluasi signifikansi risiko yang dihadapi organisasi dan untuk mendukung proses pengambilan keputusan.

KRITERIA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO (LIKELIHOOD).

Peluang kemungkinan risiko (probability atau likelihood) adalah besarnya peluang ketidakpastian terjadinya risiko, yang diperkirakan berdasarkan data historis frekuensi keseringan dari kejadian yang serupa. Skala nilai peluang kemungkinan risiko tergantung dari sistem yang diamati (lihat tabel 3).

KRITERIA DAMPAK (CONSEQUENCES)

Tingkat keparahan dampak (impact atau severity atau consequences) adalah

potensi konsekuensi terburuk jika risiko terjadi yang ditunjukkan dengan tingkat cedera, kerusakan, waktu terbangun, dan/ atau kerugian finansial. Skala tingkat keparahan dampak risiko tergantung pada jenis risiko dari sistem yang diamati. (lihat tabel 4).

SELERA RISIKO (APPETITE)

Risk appetite atau selera risiko merupakan jumlah risiko yang bersedia diambil perusahaan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan. Selera risiko dan toleransi risiko sering digunakan bersama. Toleransi risiko adalah jumlah tertentu yang boleh melewati risk appetite tetapi harus sesuai dengan limit risiko yang telah ditetapkan. Rencana Bisnis tahunan harus dibuat dengan memperhatikan batasan dari selera risiko

dan toleransi risiko, untuk memastikan perusahaan dalam melaksanakan strategi tidak melampaui limit risiko.

PENUTUP

Demikian sedikit sharing informasi yang bisa diberikan oleh penulis dalam rangka menganalisa risiko di Dana Pensiun. Tentu saja hal ini tidak dapat dijadikan acuan secara langsung, karena sistem, prosedur, sumber daya manusia dan juga kondisi masing-masing Dana Pensiun berbeda-beda. Sharing informasi ini dapat dijadikan sebagai wawasan bagi rekan-rekan dalam menyusun kertas kerja daftar risiko (risk register).

Terima kasih semoga bermanfaat buat rekan-rekan.





ECONOMIC OUTLOOK 2023

TETAP OPTIMISTIS DI TENGAH KETIDAKPASTIAN GLOBAL

Pemerintah mematok target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% pada tahun 2023. Kemenkeu optimistis target itu tercapai setelah pertumbuhan kuartal III-2022 mencapai 5,7%. **Sementara itu, IMF menurunkan target pertumbuhan Indonesia dari 5,2% menjadi 5%.** Meski demikian, IMF menilai ekonomi Indonesia jadi titik terang di tengah perekonomian dunia yang cenderung suram pada tahun 2023.



“Di tengah dunia yang gelap, Indonesia adalah titik terang.” Itulah penggalan kalimat Managing Director IMF, Kristalina Georgieva tentang perekonomian Indonesia, yang kerap dikutip Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan. Jokowi yakin, perekonomian Indonesia masih menjadi yang terbaik di tengah situasi ekonomi dunia yang sedang bergejolak.

“Bahkan Managing Director dari IMF mengatakan bahwa di tengah dunia yang gelap, Indonesia adalah titik terang,” ujar Jokowi mengulang pernyataan Georgieva, dalam acara Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2023, sebagaimana disiarkan kanal YouTube Kementerian Keuangan, Kamis (1/12/2022).

Walau pada kesempatan lain Presiden

menegaskan perlunya kewaspadaan dalam pengelolaan ekonomi di tengah ketidakpastian global, nada optimisme masih terpancar. Alasan Presiden tetap optimistis mengacu pada sejumlah indikator penting yang sudah dicapai sampai kuartal III-2022. “Pertumbuhan ekonomi kita di kuartal III mencapai 5,72%. Purchasing manager index kita pada level ekspansif. Rata-rata dunia sudah di bawah 50, kita angka terakhir yang saya tahu 51,8. Masih di atas 50, kenapa kita tidak optimis? Harus optimis,” ujar Jokowi dalam Rapimnas Kadin, Jumat (2/12/2022).

Optimisme yang sama diungkapkan mantan menteri keuangan, M. Chatib Basri. meyakini ekonomi Indonesia tidak akan jatuh ke jurang resesi. Meski demikian, ia mengakui ekonomi

Indonesia akan mengalami perlambatan. Perlambatan Indonesia dipicu penurunan ekonomi negara maju, yang ujungnya akan berdampak pada penurunan penyerapan produk ekspor Indonesia. “Kalau ditanya apakah Indonesia akan resesi atau tidak, jawaban saya tidak,” ungkap Chatib ketika menjadi pembicara pada Investor Daily Summit 2022, di JCC, Senayan, Selasa (11/10/2022).

Di mata Chatib Basri, risiko resesi sesungguhnya akan lebih dirasakan negara-negara dengan kontribusi ekspor sangat dominan terhadap pertumbuhan ekonomi negara bersangkutan. Ia memberi contoh Singapura yang porsi ekspornya menyumbang hingga lebih 200% terhadap PDB negara itu. Ketika ketidakpastian ekonomi global meningkat, mengacu pada data historis, ekonomi Singapura

sangat merasakan dampaknya. Hal ini terjadi karena serapan atas berbagai produk ekspor Indonesia menurun tajam sehingga menghambat peluang pertumbuhan.

Sebaliknya, kontribusi ekspor Indonesia terhadap PDB dinilai relatif kecil sehingga dampak tidak terlampau besar jika terjadi penurunan karena krisis global. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor Indonesia pada kuartal II-2022 berkontribusi 23,2% pada PDB. Sedangkan kontribusi ekspor pada PDB nasional pada selama 2021 sebesar 21,56%.

“Porsi ekspor kita terhadap PDB relatif kecil dibandingkan dengan negara seperti Singapura, atau Malaysia. Saya bisa membayangkan bahwa guncangan global akan berdampak negatif ke negara yang terkena dampak signifikan seperti Singapura karena pangsa perdagangan terhadap PDB lebih dari 200% tetapi dalam kasus Indonesia, ekspor ke PDB kita sekitar 23%,” ujar Chatib Basri.

Chatib juga mengenang tahun 2008 ketika Indonesia lolos dari ancaman krisis keuangan global. Dua faktor pendukung adalah respons kebijakan yang baik serta keberuntungan. “Saya pikir situasi serupa akan terulang lagi (tahun 2023). Kemudian faktor kedua yakni pangsa ekspor terhadap PDB yang relatif kecil,” ujarnya.

Optimisme yang sama dilontarkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Menurut Menkeu, perekonomian Indonesia pada 2023 relatif bebas resesi, terutama jika pertumbuhan tahun 2022 bisa bertahan di atas angka psikologis 5%.

Optimisme itu menguat setelah pada kuartal III tahun 2022 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,72%. Sri Mulyani berharap bahkan berharap capaian tersebut bisa berlanjut kuartal IV 2022. “Kalau itu terjadi, berarti 5% berturut-turut pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu di atas 5%,” ujar Sri Mulyani ketika berbicara pada acara Rapimnas Kadin, di Jakarta Jumat, (2/11/2022).

Menkeu menambahkan, anggaran



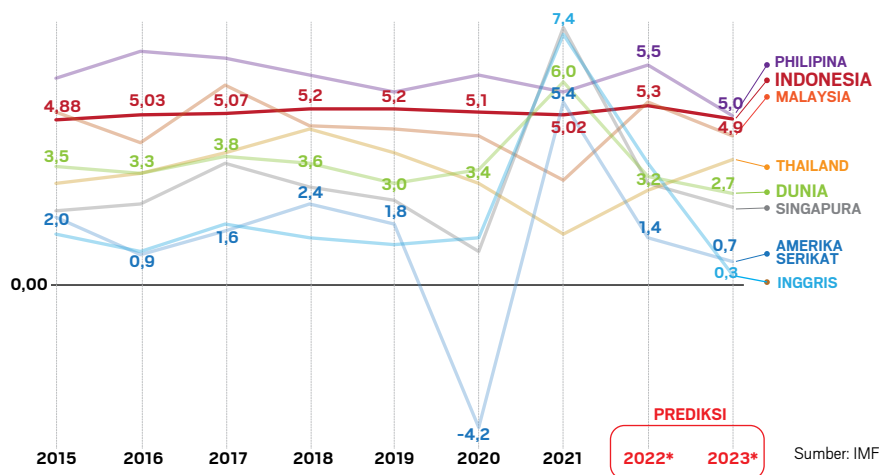
INDIKATOR EKONOMI INDONESIA

KETERANGAN	2022
a. Pertumbuhan ekonomi (Q3-2022)	5,72%
- RAPBN 2023	5,3% *
- Bank Indonesia	4,5% - 5,3% *
- INDEF	4,8%
- LPEM FEB-UI	5,3%-5,4% (2022) 5,0%-5,1% *
- IMF	5,3% *
b. Inflasi (yoy, Nov 2022)	5,42%
c. Cadangan Devisa (Nov 2022)	US\$ 133.994 Juta
d. Ekspor (akumulatif Jan - Nov 2022)	US\$ 268,18 Miliar
e. Impor (akumulatif Jan - Nov 2022)	US\$ 217,58 Miliar
f. Realisasi Investasi (akumulatif-Trw III-2022)	
- PMDN	Rp 413,1 Triliun
- PMA	Rp 479,3 Triliun

Keterangan: * Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023.

Sumber: BPS, BKPM.

PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA ASEAN, AMERIKA SERIKAT DAN DUNIA



Sumber: IMF

pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2023 tetap dirancang dengan nuansa optimistis namun dengan kewaspadaan. Optimisme dilandasi pertumbuhan yang baik sejauh ini. Itu sebabnya, sesuai asumsi makro APBN 2023, pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,3%. “Ini sangat ambisius,” tegas Menkeu.

Sri Mulyani menjabarkan, target pendapatan negara untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp 2.463,0 triliun. Sedangkan target belanja negara untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp3.061,2 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.246,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp814,7 triliun. Porsi belanja pendidikan dan kesehatan masih tetap memiliki alokasi terbesar di dalam rangka membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan produktif dengan alokasi sebesar Rp 612,2 triliun.

Sementara anggaran infrastruktur diarahkan untuk penyelesaian proyek-proyek strategis nasional, termasuk Ibu Kota Negara Nusantara. Juga ada porsi anggaran untuk penguatan hilirisasi industri. Total anggaran infrastruktur sebesar Rp392,1 triliun.

Seangat APBN 2023 tidak lain mendorong produktivitas nasional dan menjaga keberlanjutan keuangan negara di tengah ketidakpastian perekonomian global. “APBN tahun 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme dan sekaligus menjaga pemulihan ekonomi, namun pada saat yang sama meningkatkan kewaspadaan di dalam merespon gejolak global yang akan terus berlangsung pada tahun depan,” tegas Sri Mulyani.

Namun Bank Indonesia (BI) punya pandangan berbeda dengan pemerintah. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, perekonomian Indonesia pada 2023 ada indikasi melambat menjadi 4,37%. Perry juga menandakan bahwa sulit untuk membuat perkiraan indikator ekonomi



Menkeu
Sri Mulyani

FOTO: DOK KEMENKEU



Bambang Brodjonegoro

JPN.COM / RICHARDO

karena volatilitas ekonomi global. Meski demikian, BI membuat asumsi inflasi utama pada 2023 sebesar 3,61%, lebih rendah dari inflasi tahun ini sebesar 5,6%.

Pandangan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) juga patut diperhitungkan. IMF memperkirakan, ekonomi global 2023 cenderung suram, yang ditandai dengan resesi keuangan yang melanda sejumlah

negara. Faktor pemicu adalah ketidakstabilan di pasar keuangan.

“Kami memperkirakan negara-negara yang menyumbang sepertiga ekonomi dunia mengalami kontraksi ekonomi setidaknya dalam dua kuartal berturut-turut tahun ini atau tahun depan,” ujar Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva ketika berbicara di Georgetown University Amerika Serikat, dikutip dari laman resmi IMF, Minggu (9/10/2022).

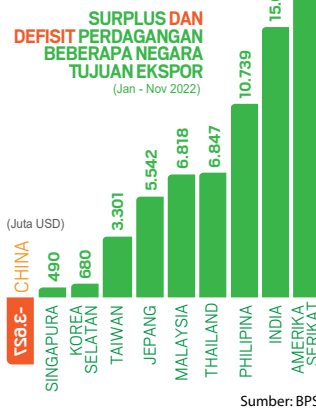
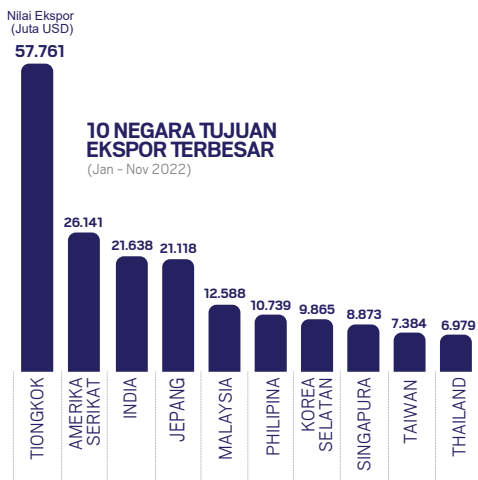
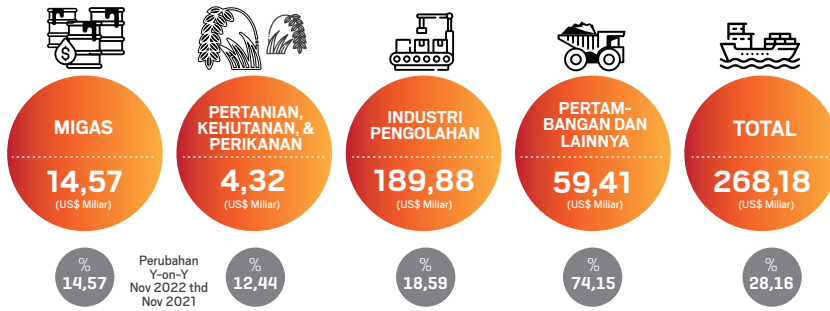
Menurut Kristalina Georgieva, pertumbuhan ekonomi dunia akan terasa seperti resesi, karena pendapatan riil menyusut dan harga-harga barang akan mengalami kenaikan. Buntutnya, output global akan tergerus hingga US\$ 4 triliun selama kurun waktu 2022-2026. Jika asumsi ini terjadi, maka akan menjadi kemunduran serius bagi perekonomian dunia.

Memperhitungkan fakta-fakta tersebut, IMF bahkan telah menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi global sebanyak tiga kali menjadi 3,2% tahun ini dan 2,9% pada 2023. Alasan IMF menurunkan target pertumbuhan Indonesia karena faktor inflasi global yang sangat tinggi, ketatnya kebijakan moneter di sejumlah wilayah, perang Rusia dan Ukraina, serta pandemi Covid-19 belum kunjung usai.

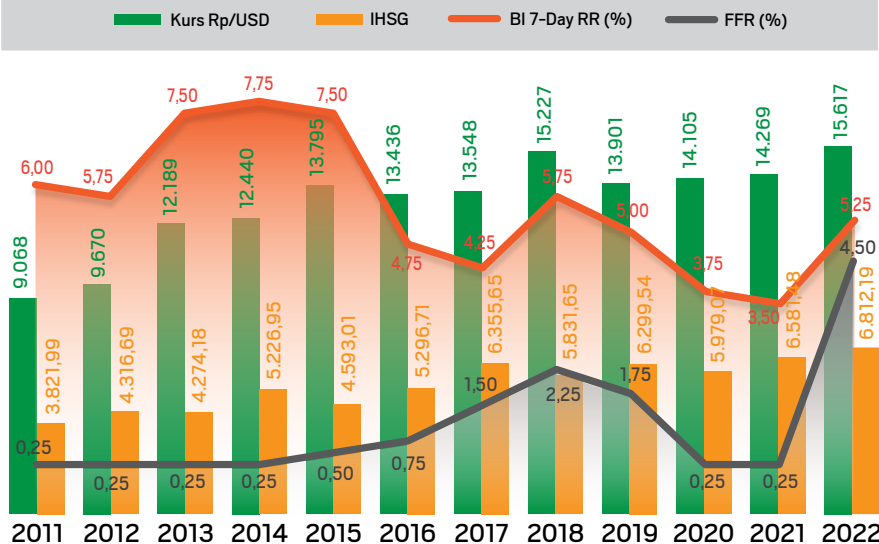
Sebaliknya, untuk tren pertumbuhan ekonomi Indonesia, IMF mempertahankan target pertumbuhan sebesar 5,3% tahun ini. Namun, untuk target pertumbuhan 2023 diturunkan dari 5,2% menjadi 5%. Target IMF ini tentu lebih rendah dari target pemerintah yang tertuang dalam APBN 2023 sebesar 5,3%.

Mantan menteri keuangan Bambang Brodjonegoro, menegaskan, perekonomian dunia pada saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kondisi yang sama juga dirasakan di Indonesia, dan akan berlanjut pada tahun depan. Karena itu

EKSPOR INDONESIA BERDASARKAN SEKTOR (Januari - November 2022)



PERKEMBANGAN IHSG, FFR, BI 7-DAY REPO RATE DAN KURS RP TERHADAP USD



* FFR, BI-7 Day RR Des '22, IHSG & Kurs Rp/USD per 16 Des 22

Sumber: BEI, BI & The Fed.

Bambang mengimbau pemerintah untuk tidak lupa segera melakukan mitigasi berbagai tantangan maupun risiko yang bisa dihadapi Indonesia.

Beberapa poin yang perlu menjadi perhatian mencakup dampak kebijakan suku bunga tinggi di berbagai negara maju, terutama Amerika Serikat, maupun tingkat pengangguran. Bambang juga menyoroti dampak krisis pangan, energi dan perang, akan menjadi pemicu meluasnya krisis.

Melihat berbagai persoalan itu, Bambang mengingatkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia tengah menghadapi tantangan yang tidak ringan. "Ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja," tegas Bambang, ketika menjadi pembicara dalam seminar bertajuk "Economic & Capital Market Outlook 2023 CSA Awards 2022", di Jakarta, Kamis (8/12/2022).

Pandangan senada dilontarkan Ekonom PT Bank Mandiri Tbk Faisal Rachman. Ia menegaskan, risiko dari ekonomi global dan domestik nyata di depan mata. Faktor pemicu tidak lain tingkat bunga Federal Reserve yang masih akan dalam tren naik. Pada saat yang sama, resesi juga melanda berbagai negara dunia yang menjadi tujuan ekspor Indonesia, seperti halnya China, salah satu raksasa ekonomi yang juga mengalami perlambatan ekonomi. "Perang Rusia dan Ukraina dan tingginya harga komoditi ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tahun 2023," ujar Faisal Rachman yang juga berbicara pada seminar yang diselenggarakan Asosiasi Analis Efek Indonesia.

Walau sebagian ekonom memberikan pandangan pesimis, umumnya tetap yakin Indonesia berpeluang mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5% jika konsisten menerapkan kebijakan prudent seperti telah dijalankan sejauh ini. Peluang itu makin terbuka jika tren surplus perdagangan tetap terus dipertahankan, bahkan meningkat, selain peningkatan dari sisi realisasi investasi. □

'PRUDENT' MENATA INVESTASI DI TENGAH GEJOLAK



Komitmen menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola dana investasi tergambar pada target dan prognosa realisasi 10 Dana Pensiun yang dihimpun Info Dapen. Hal ini sejalan dengan semangat OJK yang mendorong pengelolaan dana pensiun dengan panduan *risk management* yang ketat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini punya gebrakan baru. Gebrakan itu berupa upaya mendorong pelaku industri jasa keuangan menerapkan prinsip Governance, Risk, and Compliance (GRC) yang terintegrasi. Penerapannya menggunakan teknologi digital untuk memastikan tata kelola dan meningkatkan pengelolaan risiko yang lebih baik.

Besarnya exposure industri jasa keuangan sekitar Rp29 ribu triliun perlu dikelola melalui penerapan GRC terintegrasi. Tujuannya perbaikan tata kelola dengan penggunaan teknologi digital. Penggunaan teknologi memungkinkan para stakeholder mampu memprediksi risiko dengan lebih akurat.

Tentu saja penerapan fasilitas baru ini akan bermanfaat pula bagi pengelolaan risiko bagi industri dana pensiun, termasuk pengelolaan investasi. Sebab, menurut Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), Ogi Prastomiyono, pengelolaan investasi Dapen harus diselenggarakan secara prudent dan bertanggung jawab.

Dengan demikian bisa optimal dalam upaya memberikan manfaat optimal bagi peserta. Untuk dapat merealisasikan berbagai tujuan tersebut, maka saat ini OJK tengah melakukan Regulatory Impact Analysis (RIA) untuk mengidentifikasi substansi pengaturan yang terkait dengan pengelolaan investasi.

Dengan semangat menerapkan tata kelola dana pensiun yang baik, industri dana pensiun pun menerapkan dalam praktik

investasi. Sisi risk management atau pengelolaan risiko menjadi perhatian, terutama dalam kondisi pasar keuangan berada dalam tekanan karena ancaman resesi global.

Prinsip kehati-hatian karena penerapan risk management yang ketat secara umum tampak pada target pencapaian return on investment (ROI) sejumlah Dana Pensiun yang berhasil dikonfirmasi Info Dapen. Dari 10 Dana Pensiun yang berhasil dikonfirmasi, ada Dapen yang cukup konservatif menetapkan target ROI. Namun ada yang relatif optimistis, namun sejauh ini berhasil dicapai. Secara umum, dari data 10 Dapen, tidak ada yang mematok target ROI di kisaran 10% atau lebih.

Dapen Bank Mandiri misalnya, dengan nilai aset sekitar Rp9,46 triliun, menargetkan ROI 6,43%. Target ini diharapkan bisa terlampaui, setidaknya tergambar pada prognosa realisasi sampai November sekitar 6,85%.

Dari data 10 Dapen, target ROI tertinggi dipatok Dapen Jasa Marga sebesar 9,58%. Berdasarkan angka prognosa realisasi, Dapen dengan nilai aset Rp1,5 triliun ini memperkirakan akan mencapai target ROI 9,58% tersebut. Sedangkan Dapen Bank Mandiri Dua memperkirakan ROI tahun 2022 sekitar 4,05%. Sementara prognosa realisasi sejauh ini sekitar 3,58%.

Gambaran utuh dari target ROI dan prognosa realisasi dapat dilihat pada tabel tulisan ini. Data tersebut secara umum menggambarkan industri Dana Pensiun cukup hati-hati dalam mengelola dana investasi ketika pasar keuangan dan dunia investasi portofolio masih diliputi ketidakpastian. Hal ini juga menggambarkan komitmen untuk memastikan hak para penerima manfaat tetap terjaga di tengah tantangan industri yang sangat kompleks. □

TARGET ROI & PROGNOSEA REALISASI DANA PENSIUN 2022

NO	DAPEN	ASET 2022	TARGET ROI	PROGNOSEA REALISASI
1	DP Bank Mandiri	9.462.304,37 juta	6,43%	6,85%
2	DP Bank Mandiri Dua	1.465.541,93 juta	4,05%	3,58%
3	DP Bank Mandiri Empat	590.658.30 juta	5,77%	7,31%
4	DP Bank Mandiri Tiga	624.465 juta	6,44%	8,30%
5	DP BASF Indonesia	104.773.943 ribu	7,31%	7%
6	DP BCA	5.317.035.359.862	6,15%	6,82%
7	DP Freeport Indonesia	3,6 T	7,73%	8%
8	DP Jasa Marga	1,507 T	9,58%	9,58%
9	DP LIA	55.148.869.316	6,84%	3,68%
10	DP Triputra	457 Milyar	6,0%	5,9%

PELUANG 'CUAN' SAAT IHSG MENUJU LEVEL 7.800



Walau fluktuasi sempat mewarnai pasar saham jelang tutup tahun 2022, hal itu tidak meredupkan peluang investasi saham pada 2023. Para analis saham umumnya optimistis Tahun Kelinci menawarkan cuan menarik. IHSG diprediksi menembus level 7.880 dengan dukungan enam sektor potensial.

Lazimnya gerak pasar saham merefleksikan peluang positif maupun risiko yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Sampai akhir tahun ini dan awal tahun depan perekonomian Indonesia tidak luput dari guncangan kelesuan global. Meski demikian, ada optimisme besar bahwa ekonomi Indonesia termasuk satu dari segelintir negara yang bisa mencatat pertumbuhan positif di tengah kelesuan global.

Optimisme yang sama juga berkembang di pasar modal. Setelah indeks harga saham gabungan menembus level 7.200 menjelang akhir tahun 2022, lajunya tertahan. Bahkan cenderung tertekan, diguncang isu resesi global. Namun hal ini tak menghalangi potensi pertumbuhan pasar saham yang lebih cerah pada Tahun Kelinci 2023.

Optimisme kalangan investor senada dengan pandangan para analis saham. Head of Research NH Korindo Sekuritas Liza C Suryanata mengatakan, IHSG berpotensi tumbuh 10% pada 2023. "Kalau tahun ini bisa ditutup di 7.100, secara umum tahun depan kebanyakan analis mengharapkan kenaikan maksimal 10% dari level penutupan tahun ini. Kalau di Desember kita

kurang bisa optimal karena saham yang market cap besar itu turun terus, berarti kita harus tunggu, mau tidak mau," ujar Liza C Suryanata dalam diskusi secara virtual, Senin (12/12/2022).

Ia menegaskan, relatif berat bagi IHSG bisa mengakhiri tahun ini pada kisaran 7.400-7.500, sebagaimana ditargetkan para analis pada awal 2022. Andaikan IHSG bisa menyentuh level 7.355 pada akhir tahun, itu merupakan prestasi tersendiri. "Tetapi menyikapi perkembangan seminggu terakhir, sepertinya berat ke 7.300-7.400. Jadi ke 7.100 saja sepertinya sudah oke, lanjut Liza.

Andai akhir tahun ini performa pasar kurang mumpuni, diharapkan January Effect menjadi momentum untuk mendorong kepercayaan pasar. Indikasi dari kondisi ekonomi pada kuartal pertama 2023 juga akan menentukan arah pasar saham pada Tahun Kelinci nanti.

Pandangan lebih optimistis datang dari divisi riset Mirae Asset Sekuritas Indonesia, dengan rentang kenaikan sekitar 11% menjadi 7.880 dibanding posisi November 2022. Argumennya ada peluang pertumbuhan laba bersih emiten secara berkelanjutan. Head of Research Team & Strategist Mirae Asset Sekuritas, Hariyanto Wijaya mengatakan, perkiraan kenaikan IHSG ke level 7.880 merupakan skenario moderat. Jika menggunakan skenario optimistis (bull case), indeks harga saham bisa menembus level 8.650. Sebaliknya skenario pesimistis (bear case) pada level 6.800.

Salah satu lembaga investasi global, JPMorgan Chase & Co ikut mencermati daya tarik pasar saham Indonesia pada 2023. Lembaga keuangan dunia ini mencermati potensi saham bank-bank Indonesia dan Asia Tenggara. Lembaga ini melihat perbankan Indonesia punya kinerja terbaik dan menjadi perhatian untuk tahun 2023.

Stacey Neo, Co Manager JPMorgan Asean Equity mengatakan, harga komoditas yang tinggi dalam waktu lama, kembalinya aktivitas ekonomi pasca pandemi Covid-19, dan kebangkitan pariwisata menjadi kekuatan pasar saham Indonesia pada 2023. "Kepemilikan asing terus menjadi sangat rendah di wilayah ini mengingat arus keluar yang telah kita lihat secara historis," ujar Stacey, seperti dilansir Bloomberg, Rabu (9/11).

Menurut Stacey, Asia Tenggara, terutama Indonesia, sejauh ini telah menjadi salah satu dari sedikit titik terang bagi pasar ekuitas global selama 2022. Hal ini terjadi karena harga komoditas yang lebih tinggi mendukung bisnis para eksportir asal Indonesia. Pada sisi lain, kenaikan suku bunga cukup positif untuk industri perbankan. Sektor ini bahkan menyumbang hingga 40% terhadap bobot acuan MSCI Asean Index.

Indeks saham Indonesia menurut JPMorgan punya kinerja

terbaik secara global, bahkan mendekati rekor tertinggi. Sementara itu, MSCI AC World Index justru turun 22%.

PILIHAN POTENSIAL

Jika pasar saham 2023 berpeluang rally, pertanyaan tentang saham potensial yang layak dipantau pun mengemuka. Kepala Riset NH Korindo Sekuritas Liza C Suryanata merekomendasikan investor untuk mencermati saham sektor pertambangan, energi, barang konsumen primer, serta produsen barang baku. Sedangkan saham perbankan, terutama dari emiten yang membiayai bisnis batu bara punya potensi besar tahun 2023.

Pelonggaran kebijakan zero covid policy di Tiongkok dan krisis gas akibat perang Rusia-Ukraina yang membuat produk ekspor batu bara Indonesia meningkat tajam. "Harga komoditas diperkirakan masih volatile. Bisa dipakai kesempatannya. Cari celah untuk trading. Harga coal masih di atas US\$ 400 per ton, winter belum berakhir," saran Liza.

Sedang emiten produsen nikel akan mendapatkan momentum baik karena permintaan produsen mobil listrik akan mulai meningkat. Sedangkan sektor barang konsumen primer yang potensial datang dari emiten produsen crude palm oil (CPO). "Secara konservatif, kami masih suka dengan (sektor) banking dan telekomunikasi. Internet jadi prioritas saat ini, jadi sektor ini diperkirakan masih terus berjaya," lanjut Liza.

Pada sisi lain, saham produsen bahan baku yang terkait kebutuhan pokok masyarakat, akan tetap potensial. Resesi benar akan terjadi, tetapi kebutuhan dasar tidak terlampau terpengaruh. Jelang periode Pemilu, sektor basic industry diprediksi ikut meraup keuntungan dari perputaran uang yang relatif meningkat, jelang dan selam periode kampanye.

Kepala Riset Mirae Sekuritas Hariyanto Wijaya menegaskan, optimisme Mirae mengacu pada besarnya preferensi para investor global terhadap pasar saham negara berkembang pada 2023. Pasar saham Indonesia menjadi salah satu target investor global. "Untuk sektornya, kami memiliki sektor consumer non-cyclical dan finansial karena masih akan prospektif dan dapat menjadi pilihan tahun depan," ujar Hariyanto dalam diskusi bertajuk Sage Talk & Market Outlook 2023 (6/12/2022).

Sektor consumer non-cyclicals dinilai masih menarik karena margin keuntungan perusahaan di sektor tersebut berpotensi meningkat. Dengan demikian peluang mencetak laba pada 2023 menjadi lebih besar. Sektor tersebut juga menikmati keuntungan dari tingginya harga jual produk agrikultur sejak Juli 2022.

Bagi Mirae, saham sektor keuangan yang paling potensial tidak lain perbankan. Menurut Hariyanto, laba bersih perbankan masih akan terus menguat pada 2023 didukung pertumbuhan pinjaman dan margin bunga bersih (NIM) yang tinggi. Pilihan saham Mirae condong pada sektor perbankan, pertambangan batu bara, dan consumer non-cyclicals. Individual saham yang dijagokan seperti BMRI, BBRI, BTPS, BNGA, ITMG, INDF, ICBP, dan MYOR.

JPMorgan juga menjagokan saham bank-bank di Indonesia dan Singapura. Saham bank di dua negara ini diprediksi mendapatkan keuntungan dari ekspansi margin di tengah tren kenaikan suku bunga. Industri perbankan juga akan mencatat

peningkatan permintaan kredit pada 2023. Sentimen positif pada saham bank juga terkait dengan tren pemanfaatan teknologi digital untuk efisiensi operasional. Di mata JP Morgan, Bank Central Asia memiliki salah satu rasio pinjaman terhadap simpanan terendah secara regional. Sedangkan DBS Group Holdings Ltd. memiliki rekening giro tabungan yang besar.

Manager JP Morgan Stacey Neo menyoroti daya tarik saham perusahaan yang terkait dengan kendaraan listrik (EV) di Indonesia. Alasannya, Indonesia memiliki cadangan nikel yang besar dan berencana untuk mensubsidi pembelian mobil listrik mulai tahun depan.

JPMorgan Asean Equity Fund punya posisi overweight terbesar di Indonesia dan Vietnam. Sedangkan pasar Malaysia dan Filipina dalam posisi underweight. Para investor asing dikabarkan akan menggelontorkan dana investasi hingga US\$ 5,6 miliar ke saham-saham Indonesia tahun ini. Ini akan menjadi arus masuk tahunan terbesar yang pernah tercatat.

Jika acuan pemantauan pada sektor potensial untuk 2023, para analisis umumnya menjagokan sektor cyclical, non-cyclical, basic, energy, financial, dan health. Klasifikasi sektor ini mengacu pada standar yang telah ditetapkan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Vice President PT Samuel Sekuritas, Muhammad Alfatih mengatakan, berdasarkan data historis, pasca melalui tantangan ekonomi yang kompleks, IHSG kerap bertumbuh lebih cepat. "Indeks kita saat menghadapi tantangan ekonomi, tidak butuh waktu lama, sudah balik. Bahkan, kenaikannya bisa 2 hingga 3 kali lipat," Alfatih saat menjadi pembicara pada seminar bertajuk "Menentukan Arah Investasi 2023" yang diselenggarakan D'Origin Financial & Business Advisory dan Igico Advisory, Minggu (6/11/2022).

Menurut Alfatih, jika pilihannya sektor cyclical, saham potensial yang bisa dibidik seperti CARS, MAPI, SMSM, LPPF, dan SCMA. Sedangkan dari sektor non-cyclical direkomendasikan saham AMRT, MYOR, ICBP, HMSM, AALI, GGRM, dan INDF. Jika investor berminat ke saham basic sector, pilihannya seperti saham TKIM, SMGR, TPIA, INTP, INCO, dan ANTM.

Sedangkan sektor energy yang dinggap potensial seperti MEDC, AKRA, INDY, ADRO, PGAS, TCPI, DOID, ADMR, ENRG, dan ITMG. Pada sektor finansial saham yang dijagokan seperti PNLF, BMRI, BBRI, BBNI, BBRI, SMMA, dan MEGA. Lalu sektor health yang menjanjikan seperti KLBF, CARE, hingga SIDO.

Perencana keuangan dari Finansialku, Gembong Suwito mengatakan, sentimen positif pasar saham 2023 berkaitan erat dengan peluang Indonesia mempertahankan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5%. Itu berarti, Indonesia relatif jauh dari resesi. "Ini menjadi kabar baik, di saat investor global sedang mencari mana yang baik, aman, dan nyaman di tempat investasinya, Indonesia termasuk salah satunya," ujar Gembong Suwito.

Ia menambahkan, nilai capital inflow dari investor asing pada 2021 mencapai Rp 80,52 triliun. Mengacu pada data historis dan tren perbaikan ekonomi tahun ini dan potensi 2023, pasar saham menjanjikan peluang investasi yang layak untuk dicermati. □



Selamat Tahun Baru 2023



EPISODE PEMULIHAN PASAR OBLIGASI



Kondisi ekonomi makro yang relatif terkendali pada 2023 memberi harapan akan membaiknya pasar surat utang. Asumsinya suku bunga makin terkendali, berimplikasi makin terbatasnya kemungkinan kenaikan suku bunga acuan. **Surat utang yang *undervalued* bisa menjadi bidikan potensial bagi investor.**

Inflasi “akut” menjadi topik utama dari guncangan ekonomi yang melanda dunia saat ini. Pemicunya tidak lain kenaikan harga komoditas, terutama pangan dan energi, menyusul konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Pasokan energi dari dua negara itu ke Eropa dan negara dunia lainnya macet, memicu kenaikan harga yang diikuti melambungnya inflasi. Maklum, Rusia dikenal sebagai pemasok gas utama ke Eropa, dan Ukraina sebagai produsen gandum yang ekspornya ke mancanegara. Dua persoalan itu lalu merembet tali-temali dengan kondisi ekonomi lainnya.

Inggris menjadi salah satu negara di Eropa ekonominya sangat terpuruk. Inflasi Inggris meroket hingga sebesar 10,1% secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka yang tergolong spektakuler untuk negara dengan tingkat perekonomian yang sudah mapan.

Negara Eropa dengan skala ekonomi terbesar, Jerman, tak luput dari kemelut geopolitik ini. Ancaman inflasi ikut menggerogoti negara industri ini karena tingkat inflasinya juga menyentuh angka 10% pada September 2022 secara tahunan.

Bahkan Amerika Serikat (AS) harusnya diuntungkan

dari konflik Rusia-Ukraina ikut kena imbasnya. Negeri Paman Sam sesungguhnya termasuk salah satu produsen gas terbesar dunia. Namun, gangguan rantai pasok (supply chain) karena rentetan persoalan mulai dari pandemi Covid-19, perang Rusia-Ukraina, hingga bencana kekeringan di sejumlah negara, telah memicu kenaikan inflasi AS hingga 8,2% pada September 2022.

Sementara di dalam negeri, angka inflasi juga ikut tersulut. Peningkatan ini akibat dampak lanjutan dari peningkatan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi beberapa waktu lalu. Bank Indonesia (BI) sendiri memperkirakan inflasi per Oktober 2022 akan berada di kisaran 5,88%. Angka ini lebih rendah dibandingkan capaian inflasi pada satu bulan sebelumnya yang di level 5,95%.

Senior Economist Mirae Asset Sekuritas, Rully Arya Wisnubroto, mengatakan, sebagai otoritas moneter BI tidak boleh terlalu agresif menaikkan suku bunga. Namun, di sisi lain BI harus mengatasi inflasi. “Untuk mengatasi inflasi, BI sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin kemarin atau total kenaikan sudah 125 basis poin sepanjang 2022. Memang karena kenaikan inflasi dampak

dari kenaikan BBM. Untuk membawa inflasi inti ke targetnya yaitu 3% (plus minus 1%),” paparnya.

Ia memperkirakan BI akan kembali melanjutkan kenaikan suku bunganya pada November ini menjadi 5%. Peningkatan ini, menurutnya, merupakan respon bank sentral Indonesia dalam menjaga nilai tukar. Pasalnya, bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), telah menaikkan suku bunganya (Fed Fund Rate/FFR) sebesar 300 basis hingga saat ini mencapai level 3,25%.

“Diperkirakan akan terjadi kenaikan lagi sampai dengan Desember 2022. Sementara untuk bulan November 2022, sesuai dengan signal yang diberikan The Fed berpotensi naikan suku bunga 75 basis poin. Dan kami perkirakan sampai dengan akhir tahun FFR sampai 4,5%,” papar Rully.

Capaian ekonomi dari dalam negeri sendiri, dia perkirakan akan mencatatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) triwulan III-2022 sebesar 5,6% YoY. Kenaikan ini turut ditopang surplus neraca perdagangan Januari-September 2022 yang sangat tinggi dan mencapai US\$ 39,9 miliar, serta APBN periode Januari-September 2022 yang mencatatkan surplus Rp 60,9 triliun atau 0,33% terhadap PDB.

Perbaikan ekonomi domestik dan tingginya surplus neraca perdagangan tersebut, lanjut Rully, diharapkan dapat menopang pergerakan nilai tukar rupiah yang sempat mencapai Rp 15.600 per dolar AS dan tekanan terhadap harga surat berharga negara (SBN). Meski data-data ekonomi Indonesia masih positif, namun lanjut dia, gejolak pasar global memberikan tekanan yang cukup besar pada pasar obligasi dalam negeri. Hal ini terlihat dari kecenderungan imbal hasil surat berharga negara yang mengalami kenaikan di pasar sekunder.

Menurut Rully, inflasi menjadi faktor yang berpengaruh besar ke pasar obligasi. Naiknya inflasi ini menjadi pemicu harga obligasi turun. Faktor lainnya, tambahnya, adalah suku bunga. “Kalau inflasi naik, suku bunga naik maka pasar obligasi melemah sehingga imbal hasil mengalami kenaikan. Selain itu, faktor yang berpengaruh lainnya adalah arus modal asing. Biasanya arus modal asing keluar maka biasanya obligasi mengalami penurunan,” paparnya.

Ditambahkan Fixed Income Research Mirae Asset Sekuritas Dhian Karyantono, di pasar sekunder terdapat tren penurunan harga di SUN 10 tahun yang disertai dengan kenaikan yield hingga 7,54% di akhir Oktober 2022. Kendati demikian, Dhian menilai kondisi pasar obligasi saat ini cenderung undervalued dan memprediksi harga obligasi 10 tahun bisa naik sehingga menekan yield-nya hingga ke level 7,26% pada akhir tahun dengan asumsi skenario moderat. “Potensi melandainya yield SBN di akhir tahun dibanding kondisi saat ini dapat menjadi momentum untuk



Irwanti, Investment Director PT Schroders Investment Management Indonesia

masuk ke instrumen SBN,” tutur Dhian.

Menurutnya, obligasi dengan tenor pendek dan beberapa tenor panjang masih memberikan return positif. Selain itu, investor bisa mempertimbangkan obligasi korporasi sebagai salah satu alternatif ketika perkembangan pasar cenderung negatif.

Ditambahkan Investment Director PT Schroders Investment Management Indonesia Irwanti, The Fed diperkirakan akan menahan kenaikan suku bunganya di level 3%-3,50%, karena saat ini kenaikannya sudah cepat. “Kalau The Fed menahan, maka bagus untuk dunia. Maka fixed income bisa calm down. SUN 10 tahun yieldnya 7,5%, ini menjadi entry poin yang bagus sehingga diharapkan ada inflow di fixed income sehingga fixed income will be better,” papar dia.

Irwanti pun berpendapat tekanan di pasar obligasi ini juga dipicu oleh keluarnya asing (capital outflow) dari pasar Indonesia. Kepemilikan asing, menurut catatannya, telah turun sampai 15% dari 40% sebelum pandemi. Oleh karena itu, ia memprediksi penurunan di pasar obligasi sudah cukup terbatas dari level sekarang.

Menurut dia, pasar obligasi kemungkinan akan berbalik arah dan mulai menunjukkan penguatan di paruh kedua tahun 2023. Penguatan ini karena fokus pemerintah menurunkan defisit fiskal ke bawah 3%, serta langkah BI yang mungkin akan mengerem kenaikan suku bunganya. □

'CUT LOSS' INVESTASI: ANTARA BENCI DAN RINDU*]



Oleh: Siti Rakhmawati
(Direktur Investasi Dapen Telkom)

Pada tanggal 18 Oktober yang lalu dilakukan konsultasi publik Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan khususnya kluster Dana Pensiun yang diselenggarakan oleh Kemenkeu, Bank Indonesia, OJK serta LPS, dengan mengundang berbagai elemen masyarakat termasuk CFA Society Indonesia dan Asosiasi Dana Pensiun Indonesia.

Salah satu draft pasal yang dibahas secara cukup intensif adalah pasal mengenai cut loss, yang didefinisikan sebagai menjual aset investasi di bawah harga pembeliannya.

'CUT LOSS' DAN TEORI PORTFOLIO

Teori portofolio modern yang dikembangkan oleh Harry Markowitz di tahun 1950an menyatakan bahwa dimungkinkan untuk membangun portofolio yang ideal, dan memberikan return yang maksimal pada tingkat risiko yang optimal. Investor dapat memitigasi risiko non-sistematis melalui diversifikasi, namun tetap ada risiko sistematis mengingat investasi dilakukan pada aset berisiko, bukan aset bebas risiko dan akan selalu ada residual risk meskipun telah diterapkan manajemen risiko mengingat terdapat hal-hal yang tidak bisa sepenuhnya dikendalikan seperti risiko pasar, risiko teknologi, risiko regulasi, risiko operasional dan seterusnya.

Teori keuangan tradisional mengasumsikan bahwa investor adalah rasional, tidak menyukai risiko (risk averse), serta memproses seluruh informasi tanpa bias. Namun teori keuangan behavioral yang dikembangkan oleh

Daniel Kahneman (peraih Nobel Prize di bidang ekonomi pada tahun 2002) beranggapan bahwa investor dipengaruhi juga oleh faktor emosi dan psikologis. Perilaku loss-averse investor yang tidak melakukan cut loss atas investasi yang sudah kehilangan prospek untuk dapat direinvestasikan pada aset yang memiliki prospek dan return yang lebih baik, adalah tidak rasional dan malah menyukai risiko karena mengakibatkan risiko portofolio investasi menjadi semakin besar dan tidak optimal.

Riset di Amerika yang meneliti akun trading dari broker besar sejak 1987 sampai 1993 juga menemukan bahwa investor cenderung merealisasi keuntungan jauh lebih cepat daripada kerugian (Odean, 1998). Studi di pasar modal Taiwan juga menunjukkan bahwa investor dua kali lebih sering untuk menjual saham pada saat membukukan keuntungan dibanding saat membukukan kerugian (Barber et. Al, 2007).

Perilaku ini dapat dipengaruhi pula oleh pengukuran kinerja investasi. Mengacu pada standar global kinerja investasi atau GIPS (Global Investment Performance Standard, <https://www.cfainstitute.org/en/ethics-standards/codes/gips-standards/firms>) yang dirilis oleh CFA Institute, sebuah organisasi profesi investasi, kinerja investasi hendaknya diukur sebagai return keseluruhan yang terdiri dari return yang sudah direalisasikan dan return yang belum direalisasikan (berupa kenaikan atau penurunan nilai investasi). Perhitungan dan penyajian return hanya berupa return yang telah direalisasikan

saja tanpa memperhitungkan return yang belum direalisasikan memiliki beberapa kelemahan sebagai berikut:

1. Belum secara komprehensif memperhitungkan seluruh komponen return investasi.
2. Bisa memicu behavioral bias seperti fear of regret (tidak melakukan cut loss atas investasi yang sudah tidak memiliki prospek untuk mencegah kerugian lebih jauh dan mereinvestasikan ke aset yang lebih baik prospeknya, karena berharap harga kembali ke harga perolehan) dan seeking pride (menjual aset yang masih memiliki potential upside, karena tidak sabar dalam merealisasikan keuntungan sehingga mengurangi optimalisasi investasi).
3. Bisa mendorong tingkat trading yang berlebihan sehingga meningkatkan biaya investasi.

Karena kinerja investasi diukur sebagai return keseluruhan termasuk return yang belum direalisasikan (berupa kenaikan dan penurunan hasil investasi), dalam publikasi GIPS: Guidance Statement On Benchmark For Firms disebutkan kriteria-kriteria benchmark sebagai pembandingan kinerja yang valid, yaitu :

1. specified in advance; benchmark ditetapkan sebelum periode evaluasi.
2. relevant; benchmark merefleksikan mandat, tujuan atau strategi investasi.
3. measurable; benchmark dapat dikuantifisir.
4. unambiguous; konstituen dari semesta investasi dalam benchmark dapat dengan jelas diidentifikasi dan dinilai.

5. representative of current investment options; perusahaan memiliki pengetahuan terkini atas semesta investasi dalam benchmark.
6. accountable; perusahaan memilih benchmark dan bertanggung jawab atas perbedaan antara portofolio yang dikelola dengan semesta benchmark.
7. investable; memungkinkan untuk tidak melakukan active management melainkan hanya berinvestasi sama persis dengan benchmark.
8. complete; benchmark memberikan keterwakilan yang luas dalam segmen pasar yang menjadi sasaran investasi.

Dan sejalan dengan publikasi Edhec Business School yang menyebutkan bahwa investor dan manajer investasi harus melakukan teknik kuantitatif dan kualitatif dalam menentukan validitas benchmark (Kuenzi, 2003), dalam publikasi CFA tersebut juga disebutkan beberapa situasi di mana tidak terdapat benchmark yang dapat merefleksikan mandat, tujuan dan strategi investasi antara lain investasi private equity,

real estate dan strategi alternatif seperti Liability-Driven Investing strategy / LDI. Strategi LDI bertujuan untuk mendapatkan aset yang cukup untuk memenuhi kewajiban sehingga idealnya benchmark dibangun dari kustomisasi sekumpulan sekuritas yang didesain untuk menyesuaikan dengan profil kewajiban yang didasarkan pada karakteristik yang diestimasi secara aktuarial seperti durasi dan konveksitas.

PRINSIP 'BUSINESS JUDGMENT RULE'

Selain faktor pengukuran kinerja, faktor lain yang dapat mempengaruhi perilaku ini adalah adanya persepsi yang cenderung menyalahkan manajemen yang melakukan cut loss. Hal inilah yang diupayakan untuk diakomodir dalam Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan karena dalam praktek pengelolaan investasi —termasuk pengelolaan investasi dana pensiun baik publik maupun swasta— selama ini, alergi terhadap cut loss ini membuat risiko portofolio semakin besar dan tidak optimal.

Referensi yang digunakan adalah prinsip business judgment rule yang di Indonesia diadopsi dalam pasal 97 ayat (5) UU Perseroan Terbatas no 40/2007 yang kerap digunakan sebagai payung hukum direksi atas keputusannya, dengan syarat kerugian yang terjadi bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas pengurusan yang mengakibatkan kerugian, serta telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Sehingga sepanjang persyaratan tersebut di atas dipenuhi, maka manajemen yang melakukan cut loss (act of commission) tidak perlu khawatir dipersalahkan menimbulkan kerugian. Alih-alih, manajemen yang tidak melakukan cut loss (act of omission) dapat juga dianggap sebagai pembiaran yang melanggar prinsip business judgment rule karena tidak mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Tentunya fiduciary duty, duty of care, duty of loyalty dan juga keputusan reasonable berdasarkan informasi yang komprehensif serta dituangkan dalam kertas kerja yang memadai, diperlukan agar draft peraturan ini tidak malah memberikan insentif perilaku moral hazard sehingga keputusan investasi yang dibuat benar-benar memberikan nilai tambah serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada seluruh pemangku kepentingan Dana Pensiun.

***) Tulisan ini juga dibuat untuk kegiatan advokasi CFA Society Indonesia dan versi pendeknya dimuat di media massa.**

REFERENSI PUBLIKASI:

- <https://www.cfainstitute.org/-/media/documents/code/gips/2020-gips-standards-asset-owners.pdf>
- http://www.gipsstandards.org/wp-content/uploads/2021/03/gips_benchmarks_firms.pdf





Oleh: **Cahyo Indraswono, SE., M.Sc., Ak., CA.**
(Dosen Akuntansi YKPN Business School)

“DANA PENSIUN GOES TO CAMPUS”



YKPN BUSINESS SCHOOL

Kegiatan Professional in Class (PIC) merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan YKPN Business School Yogyakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk mendekatkan dunia praktek dan akademis sehingga tidak terjadi gap antar keduanya. Kegiatan ini dihadiri oleh pembicara profesional dibidangnya dan mahasiswa aktif sesuai dengan mata kuliah yang ditempuh terkait topik yang akan dibahas. PIC yang diselenggarakan YKPN Business School tanggal 25 November 2022, mengundang Direktur Utama Dana Pensiun BCA Bapak Budi Sutrisno.

Kegiatan dilaksanakan secara hybrid, di ruang seminar YKPN Business School dan online zoom serta live YouTube YKPN Business School. Kegiatan ini dihadiri oleh 435 mahasiswa YKPN Business School yang terdiri dari mahasiswa mengambil mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah (AKM), Akuntansi Keuangan Lanjutan (AKL) dan Bank dan Lembaga Keuangan Lain (BLKL).

Ketua YKPN Business School Bapak Dr. Wisnu Prajogo, MBA. membuka acara PIC kali ini dengan memberikan sambutan atas kedatangan Bapak Budi

Sutrisno. Sambutan berikutnya dilakukan oleh Bapak Dr. Julianto Agung Saputro, SE., S.Kom., M.Si., Ak., CA. selaku Wakil Ketua I bidang Akademik dan Sistem Informasi YKPN Business School. Menurut beliau PIC kali ini sangat spesial karena narasumber kegiatan ini langsung oleh Direktur Utama Dana Pensiun BCA dan kegiatan dilakukan secara onsite langsung di ruang seminar YKPN Business School. Kegiatan ini berlangsung selama 2,5 jam dimulai dari jam 09.00 sampai dengan 11.30.

Pada kegiatan Professional in Class kali ini, Bapak Budi Sutrisno membagi pemaparan materi dalam tiga bagian.

- **Pertama** memberikan motivasi bagi mahasiswa dalam menempuh pendidikan di YKPN Business School serta pentingnya dunia pendidikan bagi masa depan.
- **Kedua** mensosialisasikan tentang pengetahuan perbankan terutama terkait pengalaman pembicara selama menjadi bankir.
- **Ketiga** melakukan sosialisasi program Dana Pensiun BCA serta memberikan wawasan bagi mahasiswa tentang pentingnya program dana pensiun bagi pekerja.



Pada bagian awal Bapak Budi Sutrisno memberikan penjelasan tentang topik “Be Professional” harga proses dan syukuri hasil. Materi ini mampu membuka pikiran mahasiswa tentang pentingnya menjadi profesional dengan menempuh pendidikan saat ini terutama di YKPN Business School. Be Professional dapat dilakukan dengan membangun growth mindset dan memiliki sikap diri, mimpi, niat, modal, branding dan fleksibel dalam menghadapi berbagai situasi.

Pada bagian kedua Bapak Budi Sutrisno memberikan pengetahuan dunia perbankan (Bank Stories). Sejarah munculnya Bank dan perkembangan dijelaskan dengan baik oleh pembicara.

Menjawab pertanyaan peserta, menurut Bapak Budi Sutrisno, kesuksesan bank BCA saat ini tidak lepas dari core utama yaitu fokus terhadap pelayanan kebutuhan nasabah dalam bertransaksi di Bank. Dengan tagline BCA “Senantiasa di Sisi Anda”, bank BCA mampu menjadi bank swasta terbesar di Indonesia saat ini, karena mampu bertransformasi menjadi bank transaksional yang fokus pada pelayanan kebutuhan nasabahnya.

Pada bagian ketiga Bapak Budi Sutrisno melakukan sosialisasi dan penjelasan dana pensiun. Pensiun adalah



seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya sudah lanjut dan harus diberhentikan, ataupun atas permintaan sendiri (pensiun muda). Seseorang yang pensiun biasanya mempunyai hak atas dana pensiun atau pesangon. Jika mendapat pensiun, maka ia tetap menerima dana pensiun sampai meninggal dunia.

Kebutuhan finansial masa pensiunan dipergunakan untuk membiayai kesehatan, memelihara living cost standard dan untuk membantu pendidikan anak-anak.

Penjelasan dana pensiun ini sangat menarik perhatian mahasiswa karena mampu membuka wawasan dan pengetahuan dana pensiun. Selain itu mahasiswa juga mendapatkan pengetahuan tentang instrumen investasi dana pensiun yang harus memenuhi ketentuan regulator Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar tidak salah dalam menginvestasikan dana pensiun.

YKPN Business School Yogyakarta mengucapkan terima kasih kepada Dana Pensiun BCA terutama kepada Bapak Budi Sutrisno selaku Direktur Utama Dana Pensiun BCA yang telah memberikan materi dalam acara Professional in Class kali ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat membuka wawasan, pengetahuan sekaligus menjembatani gap antara teori dan praktik dunia kerja saat ini.



Oleh: **Oleg Salihuddin, CFP, IFP.**
(Dapen Astra)

PERAN DANA PENSIUN DALAM PEMBIAYAAN HIJAU

“Menjaga kesinambungan penghasilan peserta pasca pensiun dapat dikombinasikan dengan tujuan pembiayaan hijau untuk menjaga keberlangsungan hidup generasi masa depan.”

KEMAMPUAN PENDANAAN DP

Dana Pensiun, merupakan satu dari industri keuangan non-bank yang memiliki kemampuan pendanaan besar di Indonesia. Pendanaan tersebut berasal dari peserta dan perusahaan yang menjadi pendiri dana pensiun. Sesuai dengan laporan statistik dana pensiun Otoritas Jasa Keuangan per September 2022, total aset neto DPPK PPMP dan PPIP sejumlah lebih dari 215 Triliun Rupiah. Dari sisi iuran (peserta dan pemberi kerja) bulanan seluruh dana pensiun, berkontribusi iuran yang dipungut sebesar 258 Miliar. Bukan angka yang kecil untuk menjadi sumber dana investasi rutin di Indonesia.

Jika ditelisik lebih dalam, berdasarkan data OJK di atas, penempatan aset neto DPPK PPMP dan PPIP mayoritas ada di surat berharga negara (SBN) sebesar 34.29% dan obligasi korporasi sebesar 22.63%. Sebuah strategi investasi yang patuh terhadap amanat Peraturan OJK No. 1/2016 tentang Investasi SBN Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, dimana dana pensiun wajib menempatkan aset kelolaannya, minimal 30% dari portofolio investasi yang dikelola.

Dikutip dari wawancara Ketua Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI), Bapak Ali Farmadi, dengan kontan.co.id pada berita online tanggal 24 November 2022 berjudul: “Resesi Global Mengancam, Begini Proyeksi Investasi Dapen ke Depan”, disebut bahwa tantangan investasi dimasa depan cukup

menarik karena masuk ke dalam era suku bunga tinggi dan ketidakpastian (iklim) investasi. Oleh karena itu, Bapak Ali Farmadi merasa dana pensiun perlu mempertimbangkan 4 hal dalam strategi investasi atas pendanaan yang besar di atas:

1. Penyesuaian profil kewajiban manfaat pensiun peserta.
2. Kombinasi money market, capital market dan instrument lainnya sesuai profil kewajiban dan risk appetite pendiri dana pensiun dan peserta.
3. Pemilihan instrument yang sesuai dengan profil risiko.
4. Menjaga kejelasan exposure yang diambil terkait underlying instrument.
5. Memperhatikan dengan seksama target pencapaian investasi yang ditetapkan pendiri dan/atau dewan pengawas dana pensiun, serta suku bunga teknis bagi dana pensiun PPMP.

DORONGAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBIAYAAN HIJAU

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 telah berhasil terlaksana di Bali pada 15-16 November 2020. Indonesia sebagai tuan rumah telah berhasil menyelenggarakan konferensi bagi 20 negara maju dan berkembang untuk bersamasama mengatasi krisis, terutama yang melanda negara-negara yang berada di kawasan Asia, Rusia dan Amerika Latin.

Salah satu bahasan menarik pada KTT G20 kemarin adalah dorongan untuk pembiayaan hijau. Pembiayaan

hijau adalah dorongan aliran keuangan (dari berbagai industri keuangan, salah satunya dana pensiun) agar dapat digunakan untuk prioritas pembangunan berkelanjutan, terutama yang berdampak pada pola produksi dan konsumsi di masa depan.

Dikutip pada berita bpk.go.id berjudul “Pembiayaan Hijau Selamatkan Masa Depan Indonesia”, Pembiayaan hijau dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan investasi dalam teknologi bersih dan hijau. Indonesia berkomitmen menjadi destinasi utama bagi investasi hijau dunia dengan mencantumkan komitmen tersebut pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Indonesia. Peraturan Presiden mengenai energi terbarukan-pun akan segera diberlakukan demi memfasilitasi hal tersebut.

Konsentrasi pengembangan pembiayaan hijau dapat berfokus pada sektor-sektor berikut:

1. Pencegahan & pengendalian polusi
2. Manajemen sumber daya alam yang bersih
3. Pariwisata berkelanjutan
4. Keanekaragaman Hayati
5. Transportasi berkelanjutan

PERAN YANG DAPAT DIAMBIL DANA PENSUN

Karakter pendanaan dana pensiun bersifat stabil dalam penerimaan iuran dan jangka panjang dalam akumulasi dan penggunaannya, dirasa penulis sesuai dengan konsep pembiayaan hijau. Pembiayaan hijau membutuhkan kestabilan dan konsisten jangka panjang agar tujuan-tujuan pembangunan berikutnya tercapai.

Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh dana pensiun, demi menyokong pembiayaan hijau antara lain:

1. Penempatan investasi pada surat berharga negara untuk tujuan pembangunan berkelanjutan. Terkini pemerintah menerbitkan sukuk ritel ST009, yang mengusung tema green sukuk atau sukuk yang berorientasi pada pembangunan proyek ramah lingkungan dalam mengantisipasi perubahan iklim dan menurunkan emisi karbon.

2. Penempatan pada obligasi korporasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Di masa depan, akan makin banyak pelaku ekonomi yang sadar terhadap pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Industri perbankan seperti BCA saja terus mengembangkan pembiayaan hijau, terungkap sudah mencapai 162 Triliun (sekitar 25% dari total kredit yang disalurkan) pada CNBC Indonesia Green Economic Forum, tanggal 1 Juli 2022.
3. Pengembangan kapasitas perusahaan (penempatan langsung) dalam menerapkan prinsip berkelanjutan. Hal yang dapat dilakukan pada perusahaan tersebut diantaranya dengan menggunakan dan atau menghasilkan produk dan jasa ramah lingkungan. Memiliki perhatian pada keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya laut, hutan dan hayati.

Pada dasarnya, tujuan dana pensiun dalam menjaga kesinambungan penghasilan peserta pasca pensiun dapat dikombinasikan dengan tujuan pembiayaan hijau untuk menjaga keberlangsungan hidup generasi masa depan. Keduanya dapat berjalan beriringan untuk masa depan yang lebih baik.



URGENSI SOSIALISASI MUDP UNTUK MASYARAKAT DAN APARATUR PEMERINTAHAN



Oleh: **Nugroho Dwi Priyohadi**,
Direktur Kepesertaan SDM dan Umum
Dana Pensiun Pelindo - Jakarta

PENGANTAR

Untuk menjadi Pengurus Dana Pensiun, ada proses fit dan proper yang wajib dijalani oleh Calon Pengurus, termasuk juga Calon Dewan Pengawas. Bapak Arif Hartanto (2002) mengatakan bahwa fit proper bagi pihak utama Dana Pensiun, terdapat tingkat ketidakkulusan yang signifikan yakni 14.6%. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2021, peserta yang mengikuti fit proper sebanyak 281 orang dengan rincian 248 dinyatakan lulus dan 33 orang tidak lulus.

Angka yang masih belum mengembirakan masih muncul di tahun 2022, yakni catatan periode Januari – Agustus 2022 peserta sebanyak 159 dengan rincian 130 dinyatakan lulus dan 29 tidak berhasil melewati proses kelayakan dan kepatutan (fit proper).

Bapak Arif Hartanto (2022) mengatakan, “ditemukan bahwa memang peserta yang tidak lulus ternyata tidak memahami atau belum mengerti secara utuh tentang fundamental tata kelola Dana Pensiun, padahal sebenarnya sudah melalui proses sertifikasi MUDP (Manajemen Umum Dana Pensiun) dan bahkan Manajemen Risiko Dana Pensiun (MRDP)”.

Ini adalah satu kondisi yang perlu kita elaborasi lebih lanjut nantinya.

Kondisi kedua adalah situasi lapangan pada saat penulis berinteraksi dengan para pensiunan dan aparatur pemerintahan. Aparatur ini yang dimaksud di sini termasuk aparatur kepolisian, kejaksaan, advokat, akademisi, dan praktisi Dana Pensiun.

Ada pernyataan-pernyataan yang menarik untuk diketahui, mengapa dapat mengemuka hal seperti ini;

“Saya mengharapkan Pengurus segera menutup anak usaha yang dilaksanakan, jika anak usaha Dana Pensiun atau anak perusahaan tersebut menghasilkan untung, saya akan diam saja. Namun kalau sampai rugi, Pengurus akan saya periksa dan akan kita bawa ke arah merugikan keuangan negara”.

Sementara itu, di sisi pensiunan juga tidak kalah galak, “Kami tidak mengerti mengapa Manfaat Pensiun tidak pernah naik selama ini, puluhan tahun, sementara bukankah perusahaan kami selalu maju meraih laba setiap tahunnya, mengapa tidak ada komitmen mensejahterakan para pensiunan, bagaimana sih Pengurus Dana Pensiun mengelola uang kami, uang perusahaan, sehingga tidak mampu menaikkan Manfaat Pensiun?”

Di penghujung yang berbeda, ada Pengurus menggerutu dengan pernyataan bahwa kesejahteraan Pengurus juga tidak sebanding dengan beban kerja, alias komite nominasi dan remunerasi tidak optimal dalam bekerja. Namun demikian, ada juga pengurus yang tetap optimis memandang masa depan karena pembayaran Manfaat Pensiun secara penuh di-cover dari pengembangan investasi.

“Aman, Alhamdulillah, pembayaran Manfaat Pensiun masih surplus jika dibandingkan dengan pengembangan investasi, sebab hasil pengembangan investasi sangat bagus dan bahkan semua biaya operasional juga di-cover dari hasil pengembangan investasi.” Imbuh seorang Pengurus Dapen.

DISKUSI

Realita di atas dapat dielaborasi setidaknya ada 3 fakta yang berkembang;

Pertama, bahwa kenyataannya standarisasi pemahaman manajemen umum dana pensiun belum secara optimal dapat dilakukan. Upaya-upaya sertifikasi MUDP maupun MRDP masih membutuhkan proses lebih lanjut sehingga penguasaan konseptual maupun operasional Dana Pensiun dapat dimiliki oleh para pihak utama.

Dalam hal ini, tidak saja Pengurus dan Dewan Pengawas, juga pihak pendiri juga tetap diperlukan sosialisasi lebih lanjut khususnya kewajiban untuk comply terhadap regulasi. Sebagaimana diketahui, terjadinya piutang Iuran Pensiun dan Iuran Tambahan dapat disebabkan ketidakmampuan keuangan Pendiri, namun juga dapat disebabkan kurangnya komitmen Pengurus terhadap kewajiban pemenuhan pembayaran Iuran pada periode tertentu. Akibatnya terjadi penumpukan piutang iuran di periode berikutnya.

Kedua, masih ada aparatur negara yang bernada “menakut-nakuti” para pengelola Dana Pensiun dengan “mengancam” akan menarik ke wilayah pidana jika anak usaha tidak menghasilkan profitabilitas sesuai yang diharapkan. Hal ini perlu dicarikan solusi, dan dalam perspektif penulis dengan dasar banyak diskusi dengan akademisi dan praktisi, bahwa menjadi bukti bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun masih membutuhkan penyamaan persepsi, khususnya dalam hal penyertaan modal langsung.

Dan definisi “merugikan keuangan

negara". Entah bercanda atau memang serius, "ancaman" akan memidanakan pengurus Dana Pensiun yang punya unit usaha/penyertaan modal/anak perusahaan yang merugi, adalah hal yang sangat serius untuk ditindaklanjuti. Realita lain, memang jika ada intensi untuk memanipulasi investasi atau fraud, tindakan hukum tetap perlu, tanpa harus "menakut-nakuti" para Pengurus yang berusaha keras mengelola investasi Dana Pensiun. Dalam perkembangannya, diakui ada juga yang terbukti bersalah dan memang wajib dihukum (lihat link: <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/03/11273571/kejaksaan-tangkap-terpidana-korupsi-dana-pensiun-pertamina-bety>)

Aparatur pemerintah perlu diberikan pemahaman yang sama mengenai Tata Kelola Dana Pensiun, baik untuk MUDP maupun MRDP. Tujuannya agar pemahaman komprehensif juga dimiliki oleh aparatur pemerintah, sehingga manakala ada masalah teknis maupun organisatoris tanpa intensi untuk tindak korupsi atau manipulasi pada Dana Pensiun, apalagi terkait pembinaan Aspek Hukum, maka diharapkan ada sinergi dan saling support lintas instansi. Dengan demikian, Pengurus dapat bekerja lebih tenang dan tetap disiplin patuh pada regulasi.

Ketiga, terkait dengan Pensiunan yang menggerutu karena Manfaat Pensiun (MP) yang tidak kunjung naik padahal inflasi setiap tahun, dan menuntut Pengurus untuk menaikkan Manfaat Pensiun. Besar kemungkinan ketidaktahuan bahwa wilayah kenaikan MP adalah di Pendi. Hal ini terkait kewajiban PSL (Past service liability) yang harus dibayarkan berdasarkan perhitungan Aktuaris, manakala MP akan dinaikkan.

Memang tetap ada juga Dana Pensiun yang stabil rutin menyesuaikan MP berdasarkan Peraturan Dana Pensiun yang menetapkan kenaikan tiap tahun, dan itu juga didukung oleh kemampuan Pendi

dan hasil pengembangan investasi Dana Pensiun. Namun secara umum banyak Dapen skema PPMP (Program Pensiun Manfaat Pasti) yang berkemampuan terbatas, sehingga MP tidak pernah naik.

SIMPULAN SARAN

Dari uraian yang melibatkan dinamika dari banyak unsur di atas, baik proses fit proper, masyarakat pensiunan, pengurus dewan pengawas, pendiri dan aparatur pemerintah, maka dapat disimpulkan bahwa kenyataannya pemahaman masya-



rakat dan aparatur pemerintah terkait Tata Kelola Dana Pensiun masih perlu ditingkatkan lagi.

Menjadi tugas dari Asosiasi, termasuk akademisi dan praktisi yang peduli, untuk secara terus menerus melakukan edukasi terhadap permasalahan Dana Pensiun. Dalam bentuk yang sederhana, namun dalam pelaksanaan akan membutuhkan energi yang besar, adalah bahwa diperlukan secara mendesak (urgen) untuk sosialisasi MUDP dan bahkan MRDP bagi masyarakat umum maupun aparatur pemerintahan.

Harapannya adalah adanya pemahaman komprehensif dari masyarakat umum dan khususnya aparatur pemerintah terhadap organisasi dan tata kelola Dana Pensiun. Tidak hanya agar pasca memiliki

sertifikasi MUDP dan MRDP dapat lulus fit proper, namun yang lebih penting agar pemahaman dalam konseptual maupun operasional Dana Pensiun, dapat dikuasai secara komprehensif.

Kondisi ideal adalah; Dana Pensiun dikelola Pengurus yang kompeten dengan pengembangan investasi yang progresif sehingga Manfaat Pensiun dapat didesain untuk naik secara rutin dengan dukungan penuh Pendi, diawasi oleh Dewan Pengawas yang peduli terhadap remunerasi dan nominasi sehingga kesejahteraan Pengurus tidak stagnan, sekaligus didukung oleh aparat penegak hukum/aparatur pemerintahan yang disiplin untuk ikut mengawal dan bukan "menakut-nakuti" pengurus sehingga kinerja Dana Pensiun akan optimal dan taat regulasi yang telah dicanangkan oleh OJK.

Kondisi nyata saat ini banyak hal masih perlu ditingkatkan sebagaimana ilustrasi panjang lebar di awal tulisan ini. Para Pemangku Kepentingan Dana Pensiun (stakeholder), benar-benar diuji untuk secara bersama bergotong royong memajukan Dana Pensiun.

Kita berharap Dana Pensiun akan semakin maju berkembang, di tengah gempuran krisis ekonomi yang mengancam, sekaligus juga tentu saja agar Pensiunan di negara kita juga semakin sejahtera. Sosialisasi berkesinambungan untuk MUDP bagi masyarakat luas dan aparatur pemerintah adalah salah satu kuncinya.

REFERENSI:

1. UU No.11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun
3. Arif Hartanto, 2022, "Fit Proper Bagi Pihak Utama Dana Pensiun", dalam Majalah Info Dana Pensiun Edisi 102, September-Oktober 2022, halaman. 39. Jakarta: ADPI
4. <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/03/11273571/kejaksaan-tangkap-terpidana-korupsi-dana-pensiun-pertamina-bety>, diakses 1 November 2022.

JENJANG KARIR INSAN DANA PENSIUN

Fungsi Pengurus Dana Pensiun sama dengan fungsi Direksi di lembaga keuangan lainnya, punya tanggung jawab sangat besar yaitu mengelola Dana Pensiun. Tapi di sisi lain, secara kebanggaan dan karir profesi, Pengurus Dana Pensiun kerap masih dipandang kurang bergengsi bagi sebagian orang. Bahkan ada asumsi sebagai insan yang “tersingkir” dari jenjang karir di induk perusahaannya.

Oleh : Arif Hartanto

Lembaga Dana Pensiun di Indonesia merupakan salah satu lembaga keuangan yang masih tergolong baru, dibandingkan dengan lembaga keuangan lain seperti perbankan dan asuransi, yang sudah lebih dikenal di masyarakat serta memiliki citra yang sebagai lembaga keuangan yang handal di masyarakat. Disisi lain, Dana Pensiun belum memiliki citra yang dibanggakan di masyarakat, bahkan dikalangan peserta program pensiun pun belum tersosialisasi secara utuh, bahkan dikalangan para pejabat dilingkungan Pendiri, Dana Pensiun belum dirasakan sebagai suatu lembaga yang akan menjamin kesinambungan penghasilan setelah seseorang berhenti bekerja.

Kehadiran Dana Pensiun setelah terbitnya UU no 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, juga masih dipersepsikan oleh banyak pihak, termasuk para pejabat dilingkungan perusahaan, bahwa dana pensiun merupakan suatu Yayasan dan pengelolaannya juga sebagaimana mengelola yayasan, sehingga bagi mereka yang mendapat tugas sebagai Pengurus Dana Pensiun berasumsi bahwa ia telah “tersingkir” dari jenjang karir di induk perusahaannya. Bila di jajaran Pengurus ada asumsi sebagaimana disebut diatas, bagi karyawan Dana Pensiun pun juga tidak berbeda, karirnya di Dana Pensiun maksimal sebatas satu level dibawah



Gatut Subadio



Hariyono



Adrian Rusmana

Pengurus. Dalam praktek, asumsi ini tidak seluruhnya benar, sebagaimana akan diuraikan berikut ini.

STATUS HUKUM DANA PENSIUN

Sebagaimana diatur dalam UU no 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, baik Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), Dana Pensiun adalah sebuah badan hukum bila telah memperoleh pengesahan dari Menteri Keuangan, sekarang oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Organ Dana Pensiun terdiri dari Pendiri, Pengawas dan Pengurus, sebagaimana organ badan hukum lain seperti perbankan, asuransi, yayasan dan lain-lain. Fungsi Pengurus Dana Pensiun sama dengan fungsi Direksi di lembaga keuangan lainnya, yaitu mengelola Dana Pensiun dan secara hukum, mewakili Dana Pensiun baik di luar maupun didalam Pengadilan. Konsekuensi lain bagi Pengurus adalah adanya ancaman pidana bilamana terjadi penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam UUDP dan peraturan pelaksanaannya.

JENJANG KARIR SDM DANA PENSIUN

Masih banyak mereka yang ditugaskan untuk menjabat sebagai Pengurus maupun sebagai Pengawas Dana Pensiun merasa bahwa penugasan tersebut “kurang bergengsi”

dibandingkan dengan penugasan lain misalnya sebagai Direksi atau Komisaris di anak perusahaan. Ketidak berhasilan mereka yang mengikuti fit and proper di OJK yang mencapai lebih dari 14%, seakan merepresentasikan asumsi ini. Kiranya perlu evaluasi dari Pimpinan Perusahaan, apakah akan ada tindak lanjut dari mereka yang tidak lulus fit proper ini.

Bagi mereka yang sudah menjalankan profesi sebagai Pengurus maupun Pengawas Dana Pensiun, pada kenyataannya tidak sedikit yang memiliki karir yang bagus, baik sebagai pimpinan di perusahaan Pendiri maupun non Pendiri. Berikut beberapa pejabat Dana Pensiun yang karirnya berlanjut di perusahaan Pendiri maupun non Pendiri.

Drs Hariyono, setelah menjabat sebagai Direktur Utama Dana Pensiun Bank Jateng, kemudian berlanjut sebagai Direktur Utama Bank Jateng untuk dua periode. Dra Hani Yuharni, setelah menjabat sebagai Direktur Utama Dana Pensiun Posindo, berlanjut sebagai Direktur Keuangan PT Posindo. Ir, Gatut Subadio MBA, dari Direktur Utama Dana Pensiun Bank Mandiri, saat ini menjabat sebagai Direktur Investasi Perum Tapera. Teguh Wahyono, dari Direktur Utama Dana Pensiun Telkom, saat ini menjabat sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Digita di Perum Pegadaian. Dra Roswita Nilakurnia, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, pernah menjabat sebagai Direktur Utama Dana Pensiun Perkebunan, demikian juga Drs Adrian Rusmana yang baru-baru ini diangkat sebagai Direktur JakPro, pernah menjabat sebagai Direktur Utama Dana Pensiun Pertamina.

Bagaimana dengan karir karyawan di Dana Pensiun, adakah kesempatan bagi mereka untuk menduduki jabatan sebagai Direksi Dana Pensiun? Dari data yang diperoleh, ada sejumlah karyawan Dana Pensiun yang kemudian menduduki jabatan sebagai Pengurus Dana Pensiun, baik sebagai Direktur Utama maupun sebagai Direktur. Drs Sularno yang saat



Sularno



Sumaryanto



Resita Kaniya



Roswita Nilakurnia



Ni Made Anita Susan



Teguh Wahyono

ini menjabat sebagai Direktur Utama Dapenma Pamsi, sebuah Dana Pensiun yang memiliki mitra pendiri lebih dari 300 perusahaan air minum seluruh Indonesia, awalnya adalah karyawan di Dana Pensiun tersebut. Dra Ni Made Susan dari karyawan Dana Pensiun Rumah Sakit Islam Jakarta, saat ini menjabat sebagai Direktur di Dana Pensiun tersebut, juga Sumaryanto SE,MM, dari karyawan Dana Pensiun sejak tahun 2003, saat ini menjabat

sebagai Direktur Akuntansi, Kepesertaan & Umum di Dapen Bank Kalsel. Dana Pensiun Danapera, yang merupakan Dana Pensiun dari MNC Group, 2 orang Direksinya berasal dari karyawan Dana Pensiun Danapera, yaitu Resita Kaniya dan Mirawati SE,Ak. Resita, MBA dari Northrop University Los Angeles, mulai bergabung sebagai staf di Dana Pensiun Bimantara tahun 1998, sedangkan Mirawati mulai bertugas sebagai staf di tahun 1996.

REUNI PEJABAT DPP ADPI DARI MASA KE MASA



Berempat di Aula Gedung Dana Pensiun BNI 46, hari Jumat 25 November 2022 telah diselenggarakan acara silaturahmi antar pejabat DPP ADPI dari masa akhir abad yang lalu sampai dengan saat ini. Hadir 5 dari 6 mantan Ketua Umum ADPI, yaitu pak Satino (2003-2005), pak Djoni Rolindrawan (2009-2013), pak Gatut Subadio (2013-2015), pak Mudjiharno (2015-2017), pak Suheri

(2017-2022) serta Ketua ADPI saat ini pak Ali Farmadi. Pak Sardjono, Ketua ADPI periode 1997-2002 berhalangan hadir, hanya mengirim salam bagi para juniornya. Acara yang diprakarsai oleh pak Satino mendapat dukungan penuh dari Dirut Dana Pensiun BNI, pak Asmoroahadi, serta dari ADPI dan LSP Dapen. Ternyata para Ketua ADPI adalah penyanyi handal... di masanya, sebagaimana terlihat dalam gambar-gambar di halaman ini.





DIREKTUR EKSEKUTIF PERKUMPULAN ADPI

Dewan Pengawas dan Pengurus Perkumpulan ADPI, Jum'at 2 Desember 2022 telah menyelenggarakan Rapat dengan agenda penggantian Direktur Eksekutif Perkumpulan ADPI, sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan pak Bambang Sri Mulyadi. Seperti diketahui, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perkumpulan, masa jabatan Direktur Eksekutif adalah 4 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu

masa jabatan selanjutnya. Pak Bambang Sri Mulyadi telah melaksanakan tugas selama 2 periode, sehingga harus digantikan oleh pejabat yang baru. Dalam rapat tersebut, telah ditetapkan pak Budi Sulistijo sebagai Direktur Eksekutif Perkumpulan ADPI yang baru untuk periode Desember 2022 sampai dengan Desember 2026. Pak Budi sebelumnya adalah Direktur Utama Dana Pensiun Jasa Raharja.

Selamat bertugas
Pak Budi...





ADPI

KALENDER PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKUMPULAN ADPI TAHUN 2023

DIKLAT (4 Hari)

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	BIAYA (RP)
MANAJEMEN UMUM DANA PENSIUN	9 - 12	6 - 9	6 - 9		8 - 11	5 - 8	3 - 6	7 - 10	4 - 7	2 - 5	6 - 9	4 - 7	6.000.000
MANAJEMEN INVESTASI DANA PENSIUN	16 - 19					12 - 15			18 - 21		13 - 16		5.000.000
MANAJEMEN INVESTASI DANA PENSIUN LANJUTAN		14 - 17					10 - 13					11 - 14	5.000.000
AKTUARIA DANA PENSIUN								7 - 10			20 - 23		5.000.000
AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN DANA PENSIUN					8 - 11						27 - 30		5.000.000

WORKSHOP (1 s.d. 3 Hari)

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	BIAYA (RP)
PENGELOLAAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DANA PENSIUN		28					18				15		2.500.000
MANAJEMEN RISIKO DANA PENSIUN	24 - 25	21 - 22	28 - 29		29 - 30	26 - 27	25 - 26	22 - 23	25 - 26	24 - 25	28 - 29	19 - 20	4.000.000
PENYUSUNAN RENCANA BISNIS TAHUNAN DANA PENSIUN			14 - 15				11 - 12			17 - 18			3.500.000
MANAJEMEN PENDANAAN DAN KEPESERTAAN DANA PENSIUN						20 - 21					21 - 22		3.500.000
MANAJEMEN PENGAWASAN DANA PENSIUN		7 - 9					24 - 26			10 - 12			4.000.000
PENILAIAN TINGKAT RISIKO & PENYUSUNAN PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO			7 - 9							17 - 19		18 - 20	4.000.000
PENYUSUNAN PEDOMAN TATA KELOLA DANA PENSIUN & PELAPORANNYA			14 - 16			20 - 22			12 - 14				4.000.000

Catatan:

- Penyelenggaraan In House Training / Private Class di luar jadwal Kaldik Perkumpulan ADPI akan diatur secara tersendiri, silahkan menghubungi email diklat@adpi.or.id
- Biaya belum termasuk PPH 23 sebesar 2%



INFORMASI LEBIH LANJUT:

Mengenai formulir pendaftaran dan teknis pelaksanaan bisa hubungi

Contact Person: **Marissa/Nisa** : 021-2514761/62 • diklat@adpi.or.id